

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pembangunan terbagi menjadi dua yaitu *bottom-up* dan *top down* (Kusnadi, 2006). *Top-down* adalah pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan *bottom-up*, adalah pembangunan yang dimotori oleh masyarakat sebagai aktor. Melalui Musyawarah Rencana Pengembangan tingkat Desa (Musrenbangdes) dan Kecamatan (Musrenbagkec) masyarakat dapat membangun daerahnya. Karena masyarakat sendiri yang mengetahui dan memahami daerahnya masing-masing. Menurut Tomy Yulianto, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Malang (Bappekab Malang),” saat ini kebijakan sudah bersifat *bottom up*”. Akan tetapi realnya pembangunan *bottom-up* belum terlaksana.

Selain itu tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih didominasi oleh laki-laki. Hal ini disebabkan oleh kesadaran dari masyarakat sendiri akan kesetaraan dan keadilan gender (perempuan dan laki-laki) secara politik, sosial, ekonomi, budaya yang berkaitan dengan dengan pembangunan masih sangat rendah.

Dikotomi antara laki-laki dan perempuan warisan dari kebudayaan masyarakat Indonesia khususnya Jawa masih mengakar dalam kehidupan mereka. Masyarakat yang hidup dipedalaman yang tertutup dari komunikasi dan informasi masih membedakan laki-laki dan perempuan dalam sektor publik dan domestik.

Partisipasi perempuan menjadi penting dalam pembangunan karena pembangunan sendiri tujuannya adalah untuk masyarakat sendiri. Selain

kesejahteraan secara ekonomi juga kesejahteraan secara pendidikan, keahlian dan sebagainya. Akibat dari budaya patriarki ternyata perempuan dan laki-laki tidak menikmati yang sama.

Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Licin Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Karena penelitian di daerah ini masih sedikit sekali dilakukan hingga pengembangan daerah ini masih minim. Harapannya dengan dilaksanakannya penelitian ini maka akan meningkatkan pembangunan di Pantai Licin serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.

1.2. Permasalahan

Isu gender merupakan isu yang paling terkini dibahas. Dan saat ini masih sedang tren pemberitaan media, kajian di bidang keilmuan atau penelitian. Hal ini terlihat kasus-kasus berkaitan dengan perempuan yang sangat banyak. Mulai dari kasus kekerasan rumahtangga, stereotip, ketimpangan gender, *doubleburdent* atau isu mengenai kasus migran Indonesia yang berada di luar negeri dan sebagainya.

Dari permasalahan diatas dapat ditarik permasalahan antara lain :

1. Bagaimana profil kegiatan masyarakat pesisir Pantai Licin Kabupaten Malang dikaitkan dengan peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga dan aktivitas kemasyarakatan?
2. Bagaimana kesempatan (akses), partisipasi dan penguasaan (kontrol) laki-laki dan perempuan terhadap sumberdaya perikanan di pesisir Pantai Licin Kabupaten Malang?
3. Bagaimana perencanaan pembangunan berwawasan gender di Pantai Licin Kabupaten Malang?

1.3. Tujuan Penelitian :

Penelitian ini bertujuan untuk :

- Mengetahui dan mempelajari profil kegiatan berdasarkan gender di Pantai Licin Kabupaten Malang
- Mengetahui dan mempelajari kesempatan, akses, kontrol perempuan dan laki-laki di Pantai Licin Kabupaten Malang
- Menyusun perencanaan pembangunan wilayah perikanan berwawasan gender di Pantai Licin Kabupaten Malang

1.4. Kegunaan :

Penelitian ini diharapkan berguna bagi :

- Masyarakat (laki-laki dan Perempuan) : Menggagas pembangunan berwawasan gender di Pantai Licin Kabupaten Malang.
- Pemerintah : Memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat pesisir berwawasan gender
- Peneliti : Menambah referensi penelitian dalam bidang gender dan pemberdayaan perempuan (*women empowerment*) pada masyarakat pesisir
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang Perempuan : Untuk memberikan referensi dalam pergerakan dan penyuluhan masyarakat pesisir

1.5. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Lokasi dilakukan penelitian ini adalah di Pantai Licin Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Pada bulan Oktober-November 2011 (Surat izin penelitian di Lampiran 1)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Potensi Perikanan di Indonesia

Undang-undang No. 45 tahun 2009 menyebutkan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Dengan jumlah pulau sekitar 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km, Indonesia dikenal sebagai negara *mega-biodiversity* dalam hal keanekaragaman hayati, serta memiliki kawasan pesisir yang sangat potensial untuk berbagai opsi pembangunan. Namun demikian dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, bagi berbagai peruntukan (pemukiman, perikanan, pelabuhan, obyek wisata dan lain-lain), maka tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut itu semakin meningkat. Meningkatnya tekanan ini tentunya akan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang ada disekitarnya. (Dahuri, 2005)

1.2. Definisi Pembangunan

Konsep “Pembangunan” lebih mencerminkan hadirnya model perencanaan dan implementasi kebijakan yang bersifat top-down, eliti. Sedangkan pemberdayaan lebih bersifat bottom-up, berbasis kepentingan konkret masyarakat (Aziz, 2005: 133-134 dalam Kusnadi, 2006)

Kedekatan konsep pembangunan dan kebijakan yang bersifat top down karena negara memainkan peranan yang sangat dominan dalam pembangunan bangsa. Hampir tak ada ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan dirinya secara leluasa dalam proses pembangunan bangsanya. Negara-negara yang demikian menganut model pembangunan pertumbuhan cepat (*rapid growth development model*). Walaupun akhirnya negara berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi model pembangunan yang tidak didukung oleh kemampuan tabungan dan investasi domestik ini sangat rapuh terhadap gejolak perubahan tingkat global (Fakih, 2001 dalam Kusnadi, 2006)

Potensi Sumberdaya alam yang melimpah itu perlu dilakukan pembangunan secara berkelanjutan agar potensi sumberdaya tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987. Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan sebagai terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa

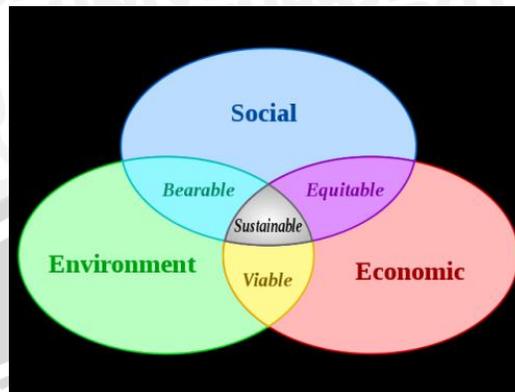
menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas. (Wikipedia, 2011)

Menurut Dahuri (1998) Pembangunan atau dalam bahasa Inggris "Development" memiliki pengertian terjadinya perubahan dalam struktur ekonomi disertai dengan peningkatan secara sustain pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Aspek penting lain adalah perubahan struktur ekonomi dan peningkatan kesejahteraan tersebut berasal dan dihasilkan oleh partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.

Persoalan Pembangunan masyarakat pesisir dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu 1) masalah sosial yaitu yang mencakup isu kemiskinan, kesenjangan sosial dan konflik 2) masalah lingkungan yang mencakup isu kerusakan ekosistem 3) masalah modal pembangunan yang mencakup isu pengelolaan potensi sumberdaya yang belum optimal dan masalah kepunahan desa nelayan atau surutnya peranan ekonomi desa nelayan serta tradisi maritimnya. Ketiga masalah ini saling terkait dengan konteks relasi kausalitas. (Kusnadi, 2006)

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987. Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial (wikipedia, 2011)

Menurut Wikipedia (2011) Ruang Lingkup pembangunan adalah sebagai berikut :



Gambar. 1. Ruang Lingkup Pembangunan

1.3. Definisi Perencanaan

Perencanaan adalah salah satu komponen dari manajemen. Manajemen urutannya yaitu 1) Penyadaran 2) Perencanaan 3) Pengorganisasian 3) Pelaksanaan 4) Penilaian 5) Pengembangan.

Perencanaan menurut Terry (1986) dalam Anwar, 2007 meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Yehezkel Dror mengemukakan bahwa perencanaan adalah proses perencanaan adalah proses untuk mempersiapkan seperangkat keputusan yang akan datang dengan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan melalui melalui sarana yang tersedia (Sudjana, 2006b dalam Anwar, 2007)

1.4. Definisi Wilayah

Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

1.5. Perencanaan Wilayah

Dalam Tarigan (2003) dijelaskan Sifat perencanaan wilayah yang sekaligus menunjukkan manfaatnya, antara lain sekaligus menunjukkan manfaatnya, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut.

1.5.1. Perencanaan Wilayah haruslah menggambarkan proyeksi dari kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan datang. Dengan demikian, sejak awal telah terlihat arah lokasi yang dipersiapkan untuk dibangun dan yang akan digunakan sebagai penyangga

1.5.2. Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan dimana lokasi kegiatan seperti ini masih diizinkan. Hal ini bias mempercepat proses pembangunan karena investor mendapat kepastian hukum tentang lokasi usahanya dan menjamin keteraturan dan menjauhkan benturan kepentingan.

1.5.3. Sebagai bahan acuan pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan.

1.5.4. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana.

1.5.5. Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan, penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah member nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat, artinya harus menjamin keserasian spasial, keselarasan antarsektor, mengoptimasi investasi, terciptanya efisiensi dalam kehidupan, dan menjamin kelestarian lingkungan.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara; termasuk didalamnya lahan atau tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya dan keadaan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kelangsungan hidupnya (Tarigan, 2003)

Perencanaan ruang wilayah adalah perencanaan penggunaan/pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (land use planning) dan perencanaan pergerakan wilayah tersebut. (Tarigan, 2003)

1.6. Definisi Gender

Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Gender sebagai konsep adalah hasil pemikiran atau rekayasa manusia untuk menemukan kembali berbagai permasalahan dan untuk mencari jalan pemecahan yang menghambat kemajuan perempuan. (Riniwati dan Harahap, 2002)

Jender adalah sebuah disiplin Ilmu, Feminisme adalah sebuah gerakan atau aksi yang membahas mengenai kesetaraan dan keadilan pada laki-laki dan perempuan. Sebenarnya Gender bukan berpihak pada perempuan akan tetapi yang tertindas. Akan tetapi data dilapang selama ini yang lebih sering terjadi penindasan adalah pada perempuan (Mufidah, 2002).

Feminis Psikoanalisis dan Gender percaya bahwa penjelasan fundamental atas cara bertindak perempuan berakar dalam psike perempuan,

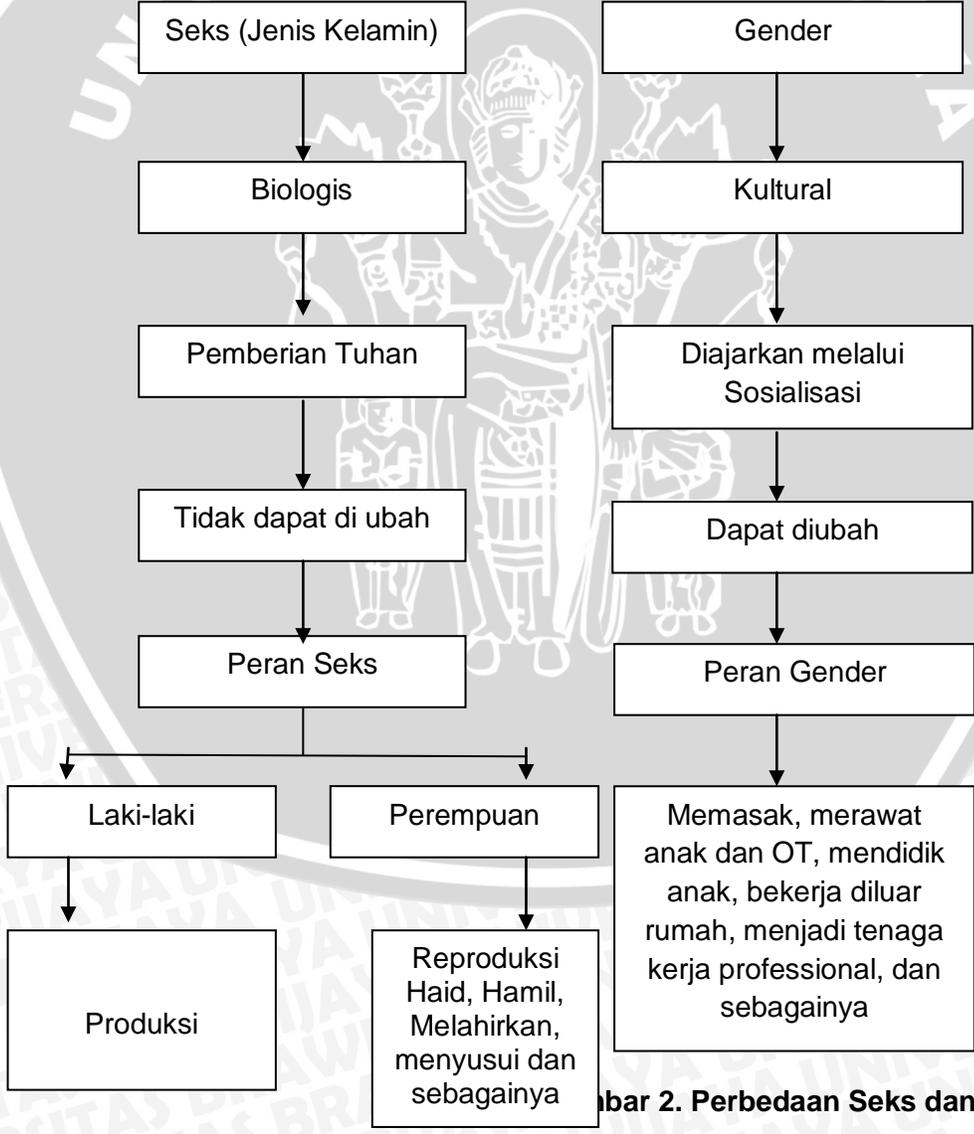
terutama dalam cara pikir perempuan. Berdasarkan konsep *Freud*, seperti tahapan oedipal dan kompleks oedipus, mereka mengklaim bahwa ketidaksetaraan gender berakar dari rangkaian pengalaman pada masa kanak-kanak awal mereka, yang mengakibatkan bukan saja cara laki-laki memandang dirinya sebagai maskulin, dan perempuan memandang dirinya sebagai feminin, melainkan juga cara masyarakat memandang bahwa maskulinitas adalah lebih baik daripada femininitas. Feminis psikoanalisis merekomendasikan bahwa kita harus bergerak maju menuju masyarakat androgin, yang di dalam masyarakat ini manusia yang seutuhnya merupakan campuran sifat-sifat positif feminin dan maskulin.

Feminis gender cenderung berpendapat bahwa mungkin memang ada perbedaan biologis dan juga perbedaan psikologis, atau penjelasan kultural atas maskulinitas laki-laki dan femininitas perempuan. Mereka menekankan bahwa nilai-nilai yang secara tradisional dihubungkan dengan perempuan (kelembutan, kesederhanaan, rasa malu, sifat mendukung, empati, kepedulian, kehati-hatian, sifat merawat, intuisi, sensitivitas, dan ketidakegoisan) secara moral lebih baik daripada kelebihan nilai-nilai yang secara tradisional dihubungkan dengan laki-laki (kekerasan hati, ambisi, keberanian, kemandirian, ketegasan, ketahanan fisik, rasionalitas, dan kendali emosi). Feminis gender menyimpulkan bahwa perempuan harus berpegang teguh pada femininitas, dan laki-laki harus melepaskan bentuk ekstrim dari maskulinitas. Etika kepedulian (*ethics of care*) feminis harus menggantikan etika keadilan (*ethics of justice*) maskulin. (Winanti, 2010).

1.7. Perbedaan seks dan gender

Sampai saat ini kehidupan masyarakat masih terjadi perdebatan antara teori nurture dan nature. Dalam kaitannya dengan jenis kelamin atau seks. Pengikut dua teori ini seperti air dengan minyak. Pengikut teori nature, secara ekstrem beranggapan bahwa perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki sebagian besar disebabkan oleh konstruksi sosial melalui sosialisasi (Murniyati, A Nunuk P, 2004).

Menurut Mufidah (2003) Perbedaan Seks dan Gender adalah sebagai berikut ::



ambar 2. Perbedaan Seks dan Gender

1.8. Beberapa Istilah dalam Jender

a. Bias Gender

Sikap yang menunjukkan sikap berpihak pada salah satu jenis kelamin tertentu secara sosial.

b. Stereotype (Stereotip)

Stereotip adalah pendapat atau prasangka mengenai orang-orang dari kelompok tertentu, dimana pendapat tersebut hanya didasarkan bahwa orang-orang tersebut termasuk dalam kelompok tertentu tersebut. Stereotipe dapat berupa prasangka positif dan negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif. Sebagian orang menganggap segala bentuk stereotipe negatif. Stereotipe jarang sekali akurat, biasanya hanya memiliki sedikit dasar yang benar, atau bahkan sepenuhnya dikarang-karang. Berbagai disiplin ilmu memiliki pendapat yang berbeda mengenai asal mula stereotipe: psikolog menekankan pada pengalaman dengan suatu kelompok, pola komunikasi tentang kelompok tersebut, dan konflik antarkelompok. Sosiolog menekankan pada hubungan di antara kelompok dan posisi kelompok-kelompok dalam tatanan sosial. Para humanis berorientasi psikoanalisis (mis. Sander Gilman) menekankan bahwa stereotipe *secara definisi* tidak pernah akurat, namun merupakan penonjolan ketakutan seseorang kepada orang lainnya, tanpa memperdulikan kenyataan yang sebenarnya. Walaupun jarang sekali stereotipe itu sepenuhnya akurat, namun beberapa penelitian statistik menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus stereotipe sesuai dengan fakta terukur. (Wikipedia, 2011)

c. Patriarki

Adalah tata nilai sosial budaya suatu masyarakat yg menempatkan ayah (laki-laki) sebagai pemimpin keluarga (Wahyuni, 2011). Dan kebalikannya, tata nilai sosial budaya suatu masyarakat yang menempatkan ibu (perempuan) sebagai pemimpin keluarga disebut matriarki.

d. Diskriminasi Gender

memperlakukan seseorang atau kelompok org secara berbeda karena jenis kelamin (Wahyuni, 2011).

e. Buta Jender

Adalah anggapan pembagian tugas laki-laki dan perempuan adalah kodrat. Misalkan laki-laki di sektor publik dan perempuan di sektor domestik (Wahyuni, 2011)

1.9. Kondisi Gender dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Kondisi Jender berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan antara lain sebagai berikut :

a. Kemiskinan

Berdasarkan Susenas 2007, jumlah penduduk miskin di Indonesia. 37.168.000 jiwa yang terdiri dari laki-laki (50,04%) dan perempuan (49,9%)

b. Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Susenas tahun 2008, tidak terjadi perbedaan yang nyata (L dan P) di semua jejaring pendidikan. Namun masih di jumpai disparitas antar wilayah terutama provinsi Papua yang baru mencapai 82,76% dan laki-laki 80, 60% perempuan.

Sementara angka buta huruf perempuan usia 15-24 tahun sebesar 0,62% dan 0,54% laki-laki. 80, 60% perempuan (usia 15-24 tahun) tertinggi yaitu mencapai 16, 30%, sementara laki-laki 9, 34%).

c. Kesehatan

Angka Kematian Ibu telah mengalami penurunan dari 307/100000 pada tahun 2002/03 dan menurun menjadi 228/100000 kelahiran hidup tahun 2007 (SDKI, 2007)

d. Kekerasan terhadap perempuan

Data Susenas 2006 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan sebesar 31% atau sekitar 3-4 juta perempuan mengalami kekerasan setiap tahun.

e. Tenaga Kerja Perempuan

Biro Pusat Statistika (BPS) tahun 2009 jumlah angkatan kerja adalah 113,74 juta orang yang bekerja 104, 49 juta orang, sebagai penganggur 9, 26 juta orang, sedangkan pekerja dengan pendidikan SD kebawah adalah 55, 43 juta orang. Pekerja sektor formal sebesar 30,51% sedangkan informal 69, 49% pekerja perempuan terkonsentrasi disektor informal dan diperkirakan mencapai sekitar 70% dari keseluruhan pekerja informal.

f. Politik dan Pengambilan Keputusan

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif juga mengalami kesenjangan, meskipun mengalami peningkatan dari periode 1999 dan 2004-2009 dan pada Tahun 2004-2014 meningkat menjadi 18,04%, Perempuan di lembaga eksekutif, berdasarkan data resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2008, perempuan yang menduduki pejabat structural eselon I hanya 8,7%, eselon II 7,1%, eselon III, 14,5%, eselon IV 24,5%.

g. Ekonomi

Pada tahun 2004 TPAK perempuan sebesar 49, 23% dan meningkat menjadi 51, 25% pada tahun 2008. Berdasarkan Sakernas 2008 kontribusi perempuan pada sektor informal adalah 73, 54%.

h. Hak Asasi Perempuan

Pemenuhan dan Perlindungan HAM perempuan masih belum memadai yang diukur dari pemenuhan hak dasar, hak sosial politik, hak ekonomi, hak mendapatkan perlindungan hukum,

i. Media

Permasalahan perempuan dan media adalah mengenai pencitraan perempuan oleh media. Yang dapat mempengaruhi pandangan hidup masyarakat terhadap perempuan. Apakah sebagai subyek yang harus dihargai dan dihormati ataukah hanya sebagai obyek yang direndahkan hak dan martabatnya

j. Lingkungan Hidup

Peranan perempuan dalam lingkungan ditunjukkan dari partisipasi perempuan dalam mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan terkait dengan pengelolaan dan pelestarian hidup maupun maupun dalam penanganan korban bencana alam.

k. Bencana Alam dan Konflik bersenjata

Persoalan yang dihadapi perempuan dalam bencana alam dan konflik bersenjata antara lain adalah perlindungan perempuan korban bencana alam, serta kurangnya pemahaman dan penghormatan mereka yang menangani bencana alam dan konflik bersenjata terhadap kebutuhan spesifik perempuan korban bencana alam, serta kurangnya pemahaman dan penghormatan mereka yang menangani bencana alam dan konflik bersenjata terhadap kebutuhan spesifik perempuan dan anak korban bencana alam dan konflik bersenjata.

l. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender masih belum efektifnya terlihat dari :

- Belum optimalnya penerapan piranti umum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan
- Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumberdaya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan dan
- Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan; dan
- Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat dalam pembangunan, terutama di kabupaten atau kota. (Wulan Suselo, 2010).

1.10. Kesetaraan Gender

Secara garis besar, di dunia dikenal ada tiga golongan besar gerakan feminisme yaitu feminisme sosialis, feminisme liberal, dan feminisme radikal. Feminisme sosialis mempersoalkan kaitan antara dominasi laki-laki dengan proses kapitalisme. Sedangkan, feminisme liberal bergerak pada tataran mikro. Yakni berusaha mempersoalkan berbagai bentuk pembagian kerja seksual dan membongkar ketersembunyian serta ketidaktampakan perempuan akibat dominasi laki-laki. Sementara itu feminisme radikal menggugat nilai patriarki dan dominasi laki-laki yang tidak hanya terbatas di arena kekerabatan saja, tapi dirasa meluas ke berbagai sektor kehidupan manusia, seperti ekonomi, politik, keagamaan, seksualitas dan sebagainya.

Untuk mempercepat menghapus kesenjangan gender, kini disadari bahwa yang perlu dilakukan tidak cukup hanya sekedar merumuskan masalah dan mengkaji masalah perempuan secara akademik. Melainkan yang dibutuhkan adalah program-program aksi yang lebih kongkrit. Tujuan utama

dari konferensi dunia di Beijing karena itu adalah sangat strategis yakni bagaimana merumuskan strategi yang benar-benar operasional : Mengubah kata menjadi perbuatan, dan cara mempersiapkan dana untuk mendukung strategi aksi yang hendak dilaksanakan. (Suyanto dan Sudarso, 2002 dalam Riniwati, 2002)

1.11. Ketimpangan Relasi Gender

Dalam perspektif struktural, fungsional setiap kehidupan tidak berjalan secaraimbang (*unbalance*) akan selalu mengakses pada kesenjangan atau ketimpangan antara dua atau lebih variabel yang antagonistik. Interaksi sosial yang sehat sebagai salah satu prasyarat (*prerequisite*) pada tatanan sosial yang harmonis tidak akan terwujud jika didalamnya terjadi ketidakseimbangan diantara satu komunitas dengan komunitas lainnya (Ritzer dan Smart, 2001: 285, Waters, 1994 dalam Rahardjo, 2000)

Perempuan merupakan kelompok terbesar dalam kelompok masyarakat yang memiliki relasi kompleks yang menghubungkan dua jenis manusia, mulai dari aspek biologis, psikologis, sosiologis dan ekonomis. Dari relasi kompleks tersebut sering muncul ketimpangan, misalnya tindak perkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan menjadi pelacur dan diskriminasi terhadap pekerja perempuan. (Rahardjo, 2000 dalam Riniwati, 2002.)

1.12. Dimensi Feminin dan Maskulin

Secara umum definisi maskulin dan feminin selalu dikaitkan dengan keyakinan yang diterapkan pada gender, yaitu laki-laki dan wanita. Dimensi ini dapat pula dikaitkan dengan generalisasi tentang ciri-ciri sifat yang dianggap mewakili ciri-ciri laki-laki dan wanita; generalisasi tingkah laku yang dianggap mempresentasikan kelompok gender tersebut; juga generalisasi tentang peran-peran yang dianggap cocok untuk mempresentasikan kelompok laki-laki

atau wanita. Keyakinan umum mengatakan bahwa ciri sifat atau peran yang dianggap sesuai untuk laki-laki adalah ciri-ciri dan sifat-sifat maskulin, sedangkan untuk wanita dianggap lebih pas untuk peran-peran dan ciri sifat feminin.

Dalam dunia psikologi, gambaran tentang ciri sifat maupun peran laki-laki dan wanita tersebut sering disebut stereotip gender digunakan untuk menguraikan aspek-aspek sosiologis, antropologis, atau kultural dari peran-peran maskulin versus feminin. Peran gender (*gender roles*) adalah apa yang diharapkan, ditentukan atau dilarang bagi satu jenis kelamin tertentu. Isi dari peran gender pada suatu budaya dan kultur tertentu ini adalah stereotip gender. Jika stereotipe gender terdiri atas keyakinan tentang ciri sifat dan karakteristik psikologis yang tepat untuk laki-laki atau wanita, maka peran gender didefinisikan sebagai perilaku yang akan terekspresi dalam peran sosial yang dimainkan (Handayani dan Novianto, 2004).

1.13. Konsep yang mengatur Wawasan Gender dalam perumusan Kebijakan

Mengupayakan peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan atau berperspektif gender, dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita di dalam pembangunan. Karena, dalam proses pembangunan kenyataannya wanita sebagai sumber daya insani masih mendapat perbedaan perlakuan (diskriminasi). Terutama, jika wanita bergerak di sektor publik dirasakan banyak ketimpangan, meskipun ada pula ketimpangan gender yang dialami oleh pria. Untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita tersebut, perlu didukung oleh perilaku saling menghargai atau saling menghormati, saling membutuhkan, saling membantu, saling peduli dan saling pengertian antara pria dengan wanita. Dengan demikian, tidak ada

pihak-pihak (pria atau wanita) yang merasa dirugikan dan pembangunan akan menjadi lebih sukses. (Sudharta, 2011)

1. Millenium Development Goals (MDG's)

Sasaran Pembangunan Milenium (bahasa Inggris : *Millennium Development Goals* atau disingkat dalam bahasa Inggris *MDGs*) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut. ^[1] Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. ^[2] Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3, dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang

tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015. (Wikipedia, 2011). Jelaslah salah satu targetnya adalah mengentaskan kesenjangan gender.

Dibalik tantangan yang ada bahwa MDG's akan menguras dana yang besar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.

2. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. (Wikipedia, 2011)

Perikanan adalah salah satu sektor di Indonesia. Dalam setiap kebijakan yang diambil haruslah mengikuti konsep PUG dan MDG's. Meski MDG's masih terkendala pendanaan. Akan tetapi PUG adalah agenda yang penting dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

1.14. Definisi Pelabuhan

Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 1 Point 23 disebutkan Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

1.15. Definisi Organisasi

Organisasi (Yunani: *ὄργανον*, *organon* - alat) adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut.

- Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama ^[2].
- James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama ^[3].
- Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

- Stephen P. Robbins menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Wikipedia, 2011).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Penelitian

Penelitian adalah investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dari suatu proposisi hipotesis mengenai hubungan tertentu antarfenomena (Kerlinger, 1986: 17-18 dalam Ussupress, 2008). Penelitian merupakan refleksi dari keinginan untuk mengetahui sesuatu berupa fakta-fakta atau fenomena alam. Perhatian atau pengamatan awal terhadap fakta atau fenomena merupakan awal dari kegiatan penelitian yang menimbulkan suatu pertanyaan atau masalah (Indriantoro & Supomo, 1999: 16 Ussupress, 2008). Penelitian pada dasarnya merupakan penelitian yang sistematis dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari (Indriantoro & Supomo, 1999: 16) Ussupress, 2008.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatusistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau

lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Nazir, M, 1983 dalam Priyana 2010). Dengan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (2003) dalam Santosa (2011) penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya, dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Proses penelitian kualitatif supaya dapat menghasilkan temuan yang benar-benar bermanfaat memerlukan perhatian yang serius terhadap berbagai hal yang dipandang perlu. Dalam memperbincangkan proses penelitian kualitatif paling tidak tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu kedudukan teori, metodologi penelitian dan desain penelitian kualitatif.

3.3. Teknik Pengambilan Data

Data yang diambil adalah Data Primer dan Sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut di peroleh. Teknik Pengambilan Data Primer dilakukan dengan menggunakan Teknik *Focus Group Discussion* yaitu melakukan diskusi dan wawancara mendalam terhadap stakeholder Untuk menggali masalah dan memecahkannya. antara lain :

- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malang
- Pemerintah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang
- Unsur Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang
- Masyarakat Pantai Batu Licin Kabupaten Malang Meliputi Nelayan, Bakul Ikan dan lain-lain

- Departemen Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
- Lembaga Swadaya Masyarakat
- Perguruan Tinggi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang
- Tokoh Masyarakat Desa Lebakharjo Kabupaten Malang

Penentuan jumlah sampel adalah melalui teknik pengambilan data dengan cara metode survey untuk mewakili keseluruhan populasi penduduk Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.

Selain dengan Teknik *Focus Group Discussion*, adalah dengan metode dokumentasi, *indepth interview* (wawancara mendalam), dan Observasi. Dokumentasi adalah teknik pengambilan data dengan mengambil gambar dari obyek yang diteliti (Smith, 2010). Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan terhadap informan dengan mendalam. Observasi adalah teknik penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap lokasi penelitian yaitu di Pantai Licin Kabupaten Malang.

Sedangkan untuk sumber-sumber data sekunder hampir tak terhitung banyaknya jenis bahan yang bias digunakan untuk tujuan ilmiah. Dari mulai hal yang sangat pribadi yaitu catatan harian (*diary*), Catatan harian di kapal (*logs*) dan buku perjanjian hingga dokumen yang dihimpun dan disebarakan secara berkala, Jenis-jenis sumber data sekunder pokok antara lain sumber data sekunder pribadi, sumber data sekunder masyarakat, arsip data, bahan-bahan publikasi lainnya. (Black and Champion, 1999). Macam data yang diperoleh meliputi data tentang potensi perikanan daerah setempat dari Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Kabupaten Malang, dan lain – lain.

Melalui bantuan Koordinator Pokmaswas Licin Jaya, Triono berhasil dikumpulkan informan sebanyak 7 orang yaitu 6 laki-laki dan 1 perempuan. Focus Group Discussion dilakukan di Pantai Licin Kabupaten Malang di Rumah Bapak Gianto dan Ibu Mujiati. Awalnya akan dilaksanakan di Balai Pertemuan TPI Licin tapi dibatalkan karena tempatnya yang kotor. Dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2011 Pukul 10.00 WIB. Yaitu Bapak Wagimin, Gianto, Triono, Paimin, Bambang Sutrisno Hadi, Sulistyono dan Ibu Mujiati. Keseluruhan berprofesi sebagai nelayan sekaligus petani, dan perempuan membantu suami (*mapag*) dan petani.

Sedangkan wawancara mendalam adalah pada Kepala Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang yang diwakili oleh Sekretaris Desa, Kepala Dusun Lebaksari, Nelayan, Pedagang Ikan, Perempuan Pesisir. Disamping itu stakeholder terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, Ketua Badan Perencanaan Kabupaten Malang (Bapekab Malang).

3.5. Analisis Data

3.5.1. Aplikasi Teknik Analisis Harvard

Data akan dianalisis dengan menggunakan analisis Harvard

Kerangka Analisis Harvard (profil Aktivitas, akses, pengambilan keputusan, faktor yang mempengaruhi)

Metode ini sering disebut metode GFA (Gender Frame Work Analysis) yang pertama kali dikemukakan oleh Overhold et al (1986) yang dirancang sebagai landasan untuk profil gender dari suatu kelompok sosial. Kerangka metode ini tersusun atas empat elemen kelompok, yaitu :

1. Profil aktivitas berdasarkan pembagian kerja gender, yang memuat daftar tugas laki-laki dan perempuan (perempuan melakukan apa?, laki-laki

melakukan apa?, aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 3 yaitu produktif, reproduktif/domestik dan sosial budaya dan keagamaan.

2. Profil Akses (perempuan dapat memperoleh sumberdaya apa-apa, laki-laki dapat memperoleh sumberdaya apa, perempuan menikmati apa, laki-laki menikmati apa?)
3. Profil kontrol (perempuan mengambil keputusan penggunaan sumberdaya apa-apa, laki-laki penentu penggunaan sumberdaya apa). Sumberdaya disini adalah sumberdaya yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas tersebut serta manfaat apa yang diperoleh dari melakukan aktifitas.
4. Faktor-faktor yang menyangkut hal-hal yang mengakibatkan adanya pembagian kerja, adanya profil, akses dan kontrol suatu masyarakat tertentu.

Analisis Harvard dapat menggunakan tabel berikut :

No	Variabel Harvard	Unit Analisis	
		Perempuan	Laki-laki
1	ProfilAktivitas		
	a. Aktivitasproduktif		
	<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan (penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan ikan, pemasaran ikan, penyediaan sarana produksi perikanan, koperasi, dll) 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Non-Perikanan (pertanian, peternakan, warung, dll) 		
	b. Aktivitas reproduktif (terkait dengan air, bahan bakar, kesehatan, pasar, memasak, merawat anak, membersihkan rumah, pakaian, peralatan, lainnya)		
	c. Aktifitas Sosial-Kemasyarakatan (Arisan, pengajian, rekreasi, kerjabakti, posyandu,		

	asosiasi, lainnya)		
2	Profil akses, manfaat dan pengambilan keputusan terhadap sumberdaya (tanah, rumah, kendaraan, kapal, emas, bisnis, pasar, tenagakerja, pendapatan, informasi, kredit, teknologi, pendidikan, kekuatan politik, pelatihan, penyuluhan, lainnya)		
3	Faktor yang mempengaruhi kondisi pada profil aktivitas, akses terhadap sumberdaya dan pengambilan keputusan (ekonomi, politik, sosial, budaya, psikologis, geografi, lingkungan, hukum, lainnya)		

Tabel. 1. Analisis Harvard

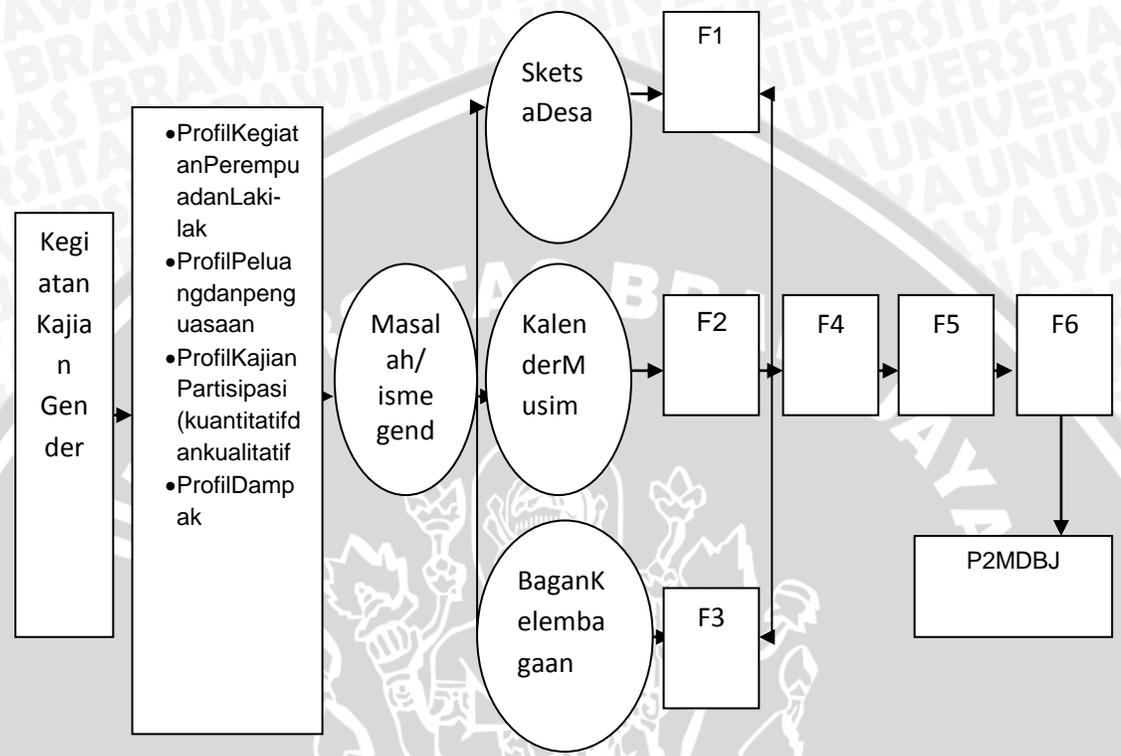
(Riniwati et.al, 2010)

3.5.2. Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa Berwawasan Gender (P2MDBG)

P2MDBG adalah perencanaan pembangunan yang disusun dari oleh dan untuk masyarakat berdasarkan permasalahan, kebutuhan, potensi, dan upaya pemecahan masalah laki-laki dan perempuan secara berimbang. P2MDBG diperlukan karena merupakan muara dari seluruh pembangunan masyarakat desa atau kelurahan baik perempuan ataupun laki-laki sebagai subyek ataupun obyek pembangunan yang diharapkan mampu memecahkan masalahnya sendiri . Harapan tersebut dapat berwujud melalui perencanaan dari, oleh dan untuk masyarakat yang memungkinkan suara keinginan dan kepentingan perempuan dan laki-laki yang terwakili secara seimbang.

Langkah-langkah penerapan P2MDBG dapat dilihat pada gambar dibawah ini :Gambar langkah-langkah Penerapan P2MDBG

Keterangan Gambar :



Gambar 3. Analisis P2MDBG

- F1 :Daftar masalah dan potensi dalam sketsa desa
- F2 :Kalender Musim
- F3 :Bagan Kelembagaan
- F4 :Pengelompokan dan Potensi
- F5 :Peringkat masalah
- F6 :Pengkajian tindakan pemecahan masalah
- F7 :penentuan peringkat tindakan

1. Pengelompokan Masalah dan Potensi di Pantai Licin dapat di lihat di tabel 2.

No	Permasalahan	Potensi
1		
2		
3		
4		

Tabel 2. Tabel Pengelompokan Masalah dan Potensi

2. Penentuan Peringkat Masalah di Pantai Licin Kabupaten Malang dapat di lihat di tabel 3.

No	Masalah	Dirasakan oleh banyak orang	Menghambat peningkatan pendapatan	Sering terjadi	Tersedia potensi untuk memecahkan masalah	Jumlah nilai	Urutan Peningkatan
1.							
2.							
3.							
4.							

Tabel 3. Tabel Penentuan Peringkat Masalah

3. Penentuan Peringkat Tindakan di Pantai Licin Kabupaten Malang dapat di lihat di tabel 4

Tindakan Yang Layak	Pemenuhan kebutuhan Orang banyak	Dukungan Peningkatan Pendapatan	Dukungan Potensi untuk mengatasi masalah	Jumlah nilai	Peringkat Tindakan

Tabel 4. Tabel Penentuan Peringkat tindakan

Riniwati, 2002)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Kabupaten Malang



Gambar 4. Peta Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya saat ini berada di Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008, Kota Kapanjen ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Malang yang baru. Kota Kapanjen saat ini sedang berbenah diri agar nantinya layak sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang,

Kabupaten Mojokerto, Kota Batu, dan Kabupaten Pasuruan di utara, Kabupaten Lumajang di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Peta Kabupaten Malang bisa dilihat di Gambar 2. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur. Kondisi Pantai di Kabupaten Malang

Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kapanjen. Pusat pemerintahan sebelumnya berada di Kota Malang. Kota Batu dahulu bagian dari Kabupaten Malang, sejak tahun 2001 memisahkan diri setelah ditetapkan menjadi

kota. Ibukota kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malang antara lain Lawang, Singosari, Dampit, dan Kepanjen.

1.1.1 Daftar kecamatan

- | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1. Ampelgading | 12. Kasembon | 23. Pujon |
| 2. Bantur | 13. Kepanjen | 24. Sumbermanjing Wetan |
| 3. Bululawang | 14. Kromengan | 25. Singosari |
| 4. Dampit | 15. Lawang | 26. Sumberpucung |
| 5. Dau | 16. Ngajum | 27. Tajinan |
| 6. Donomulyo | 17. Ngantang | 28. Tirtoyudo |
| 7. Gedangan | 18. Pagak | 29. Tumpang |
| 8. Gondanglegi | 19. Pagelaran | 30. Turen |
| 9. Jabung | 20. Pakis | 31. Wagir |
| 10. Kalipare | 21. Pakisaji | 32. Wajak |
| 11. Karangploso | 22. Poncokusumo | 33. Wonosari |

1.2 Sejarah

Ketika kerajaan Singhasari dibawah kepemimpinan Akuwu Tunggul Ametung yang beristrikan Ken Dedes, kerajaan itu dibawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Pusat pemerintahan Singhasari saat itu berada di Tumapel. Baru setelah muncul Ken Arok yang kemudian membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke Malang, setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri, dan saat jatuh ke tangan Singhasari statusnya menjadi kadipaten. Sementara Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Dhandang Gendhis (1185 - 1222).

Kerajaan ini mengalami jatuh bangun. Semasa kejayaan Mataram, kerajaan-kerajaan yang ada di Malang jatuh ke tangan Mataram, seperti halnya Kerajaan Majapahit. Sementara pemerintahan pun berpindah ke Demak disertai masuknya agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Malang saat itu berada di bawah pemerintahan Adipati Ronggo Tohjiwo dan hanya berstatus kadipaten. Pada masa-masa keruntuhan itu, menurut *Folklore*, muncul pahlawan legendaris

Raden Panji Pulongjiwo. Ia tertangkap prajurit Mataram di Desa Panggungrejo yang kini disebut Kepanjen (Kepanji-an). Hancurnya kota Malang saat itu dikenal sebagai Malang Kutho Bedhah.

Bukti-bukti lain yang hingga sekarang merupakan saksi bisu adalah nama-nama desa seperti Kanjeron, Balandit, Turen, Polowijen, Ketindan, Ngantang dan Mandaraka. Peninggalan sejarah berupa candi-candi merupakan bukti konkrit seperti :

- Candi Kidal di Desa Kidal kecamatan Tumpang yang dikenal sebagai tempat penyimpanan jenazah Anusapati.
- Candi Singhasari di kecamatan Singosari sebagai penyimpanan abu jenazah Kertanegara.
- Candi Jago / Jajaghu di kecamatan Tumpang merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Wisnuwardhana.

Pada zaman VOC, Malang merupakan tempat strategis sebagai basis perlawanan seperti halnya perlawanan Trunojoyo (1674 - 1680) terhadap Mataram yang dibantu VOC. Menurut kisah, Trunojoyo tertangkap di Ngantang. Awal abad XIX ketika pemerintahan dipimpin oleh Gubernur Jenderal, Malang seperti halnya daerah-daerah di nusantara lainnya, dipimpin oleh Bupati.



Gambar 5. Pendapa Kabupaten Malang

Kediaman bupati Malang (sekitar 1935)

Bupati Malang I adalah Raden Tumenggung Notodiningrat I yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi Gubernur Jenderal 9 Mei 1820 Nomor 8 Staatblad 1819 Nomor 16. Kabupaten Malang merupakan wilayah yang strategis pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan. Bukti-bukti yang lain, seperti beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan daerah ini telah ada sejak abad VIII dalam bentuk Kerajaan Singhasari dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Kerajaan Kanjuruhan seperti yang tertulis dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempat suci pada hari Jum`at Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender kabisat jatuh pada tanggal 28 Nopember 760. Tanggal inilah yang dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang. Sejak tahun 1984 di Pendopo Kabupaten Malang ditampilkan upacara Kerajaan Kanjuruhan, lengkap berpakaian adat zaman itu, sedangkan para hadirin dianjurkan berpakaian khas daerah Malang sebagaimana ditetapkan.

1.3 Arti lambang



Gambar 6. Lambang Kabupaten Malang

Lambang Kabupaten Malang (bisa dilihat di gambar 1) berarti:

1. MERAH PUTIH = Perisai Segi Lima
2. MERAH = Tulisan Kabupaten Malang
3. KUNING EMAS = Garis tepi atap kubah
4. HIJAU = Warna dasar kubah
5. HIJAU = Gunung Berapi
6. PUTIH = Asap
7. PUTIH DAN HITAM = Keris
8. PUTIH = Buku terbuka
9. BIRU TUA = Laut
10. PUTIH = Gelombang laut (Jumlah 19)
11. KUNING EMAS = Butir padi (Jumlah 45)
12. PUTIH = Bunga kapas (Jumlah 8)
13. HIJAU = Daun kapas (Jumlah 17)
14. KUNING EMAS = Bintang bersudut lima

15. PUTIH DAN HITAM = Pita terbentang dengan sesanti Satata Gama Kartaraharja

16. KUNING EMAS = Rantai (Jumlah 7)

Jiwa nasional bangsa Indonesia yang suci dan berani, dimana segala usaha ditujukan untuk kepentingan nasional berlandaskan falsafah Pancasila dilukiskan dengan PERISAI SEGI LIMA dengan garis tepi tebal berwarna MERAH PUTIH.

KUBAH dengan garis tepi atapnya berwarna KUNING EMAS dan warna dasar HIJAU mencerminkan papan atau tempat bernaung bagi kehidupan rohani dan jasmani diruang lingkup Daerah Kabupaten Malang yang subur makmur.

BINTANG BERSUDUT LIMA berwarna KUNING EMAS, mencerminkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Falsafah Pancasila yang Luhur dan Agung.

UNTAIAN PADI berwarna KUNING EMAS, DAUN KAPAS berwarna HIJAU serta BUNGA KAPAS berwarna PUTIH mencerminkan tujuan Masyarakat adil dan makmur.

DAUN KAPAS berjumlah 17 (Tujuh Belas), BUNGA KAPAS berjumlah 8 (Delapan), GELOMBANG LAUT berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) mencerminkan semangat perjuangan Proklamasi 17 Agustus 1945.

RANTAI berwarna KUNING EMAS mencerminkan Persatuan dan Keadilan GUNUNG BERAPI berwarna HIJAU mencerminkan potensi Alam Daerah Kabupaten Malang sedangkan ASAP berwarna PUTIH mencerminkan semangat yang tak pernah kunjung padam.

LAUT mencerminkan kekayaan alam yang ada di daerah Kabupaten Malang sedangkan warna BIRU TUA mencerminkan cita-cita yang abadi dan tak pernah padam.

KERIS yang berwarna HITAM dan PUTIH mencerminkan Jiwa Kepahlawanan dan Kemegahan sejarah Daerah Kabupaten Malang. BUKU TERBUKA berwarna PUTIH mencerminkan tujuan meningkatkan kecerdasan rakyat untuk kemajuan.

Sesanti SATATA GAMA KARTA RAHARJA mencerminkan Masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil disertai dasar kesucian yang langgeng (abadi).

1.4 Maskot

Habitat jenis fauna burung Cucak Ijo ditengarai berasal dari kawasan Malang Selatan, walaupun di beberapa daerah lain juga terdapat burung sejenis. Didasari dengan latar belakang Chloropsis Sonnerati dan disusul kemudian dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang tanggal 8 Pebruari 1996 bernomor 522.4/429.024/1995 tentang pelestarian flora dan fauna, Burung Cucak Ijo dimunculkan sebagai identitas fauna Kabupaten Malang. Kemudian dikukuhkan pula dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang, nomor 180/170/SK/429.013/1997, tentang Penetapan Maskot / Identitas Flora dan Fauna Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 26 April 1997. Dalam Surat Keputusan Bupati itu, untuk maskot flora ditetapkan Apel Manalagi (*Malus Sylvestris Mill*). Sedangkan untuk faunanya adalah Burung Cucak Ijo. Maksud penetapan maskot flora dan fauna tersebut sebagai upaya pengenalan sekaligus pelestarian yang didasari keunikan suatu jenis satwa dan tumbuhan tertentu yang terdapat di Kabupaten Malang serta merupakan ciri khas daerah. Penetapan maskot tersebut berperan pula sebagai sarana meningkatkan promosi kepariwisataan, penelitian dan pendidikan. Upaya pelestarian Burung Cucak Ijo ini dilakukan antara lain dengan cara pembangunan penangkaran terbesar yang sedang dibangun di Desa Jeru, Kecamatan Tumpang di atas lahan seluas 9,5 Ha dimana untuk Burung Cucak Ijo disediakan lahan seluas 0,5 Ha sedangkan lahan

yang lain digunakan untuk pembudidayaan dan pelestarian flora dan fauna yang lain.

1.5 Keadaan geografis

Kabupaten Malang terletak pada 112°03'50" sampai 112°57'00" Bujur Timur 7044'55" sampai 8026'35" Lintang Selatan. Kabupaten di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri dan selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia

Dengan kondisi di atas, maka Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang di Jawa Timur.

Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kota Malang sendiri berada di cekungan antara kedua wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit.

Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak digunakan ditanami tebu dan hortikultura, seperti salak dan semangka. Selain perkebunan teh, Kabupaten

Malang juga berpotensi untuk perkebunan kopi, dan coklat (daerah pegunungan Kecamatan Tirtoyudo). Hutan jati banyak terdapat di bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan kapur.

1.6 Transportasi

1.6.1 Bus

Transportasi angkutan antarkota dilayani dengan bus, pesawat, dan kereta api. Terminal bus antarkota adalah Terminal Arjosari (terminal pusat yang melayani semua jurusan), Gadang (jurusan Dampit, Wajak, Lumajang, Blitar, dan Tulungagung), dan Landungsari (jurusan Jombang, Tuban, dan Kediri). Angkutan dalam kabupaten menggunakan bus mini dan angkutan pedesaan. Terminal di wilayah Kabupaten Malang adalah Kapanjen, Dampit, Wajak, Lawang, dan Tumpang.

1.6.2 Kereta api

Malang terletak di jalur kereta api lintas Surabaya-Malang-Blitar-Kertosono-Surabaya. Terdapat 6 stasiun di wilayah Kabupaten Malang (Lawang, Singosari, Pakisaji, Kapanjen, Ngebruk, dan Sumberpucung). Lintasan kereta api di wilayah Kabupaten Malang termasuk unik karena melewati dua buah terowongan di daerah Bendungan Sutami, Karangates.

1.6.3 Pesawat

Bandara Abdul Rahman Saleh yang terletak di Kecamatan Pakis melayani penerbangan sipil dengan jurusan Malang - Jakarta (Sriwijaya Air, Garuda Indonesia, Batavia Air) dengan total penerbangan sebanyak 5 penerbangan per hari.

1.7 Pariwisata

Malang dikenal sebagai daerah tujuan wisata utama Jawa Timur. Berikut ini adalah beberapa tempat wisata menarik di Kabupaten Malang.

1.7.1 Wisata gunung

- Gunung Kawi, terletak di wilayah Kecamatan Wonosari. Terkenal sebagai tempat wisata spiritual.
- Gunung Arjuno-Welirang, sering dipakai untuk pendakian dengan rute Junggo, Cangar, Singosari, Lawang, Purwosari, atau Pandaan.
- Bromo lewat Desa Tumpang (Kecamatan Tumpang), Desa Gubuk Klakah - Kecamatan Poncokusumo.
- Gunung Semeru lewat desa Ngadas kecamatan Poncokusumo
- Gunung Anjasmoro lewat Kecamatan Pujon

1.7.2 Wisata air

- Waduk Selorejo, terletak di Kecamatan Ngantang (di tepi jalan raya Malang-Kediri)
- Kasembon Rafting, merupakan obyek wisata bagi pencinta olahraga arung jeram, terletak di Kasembon (70 km barat kota Malang).
- Bendungan Sutami, terletak di Kecamatan Sumberpucung.
- Bendungan Lahor, terletak di sebelah barat Bendungan Ir.Sutami (Sumberpucung, kab.Malang)
- Taman Ria Sengkaling, terletak di tepi jalan raya Malang-Batu, terdapat kolam renang dan taman bermain.
- Wendit Water Park, terletak di jalan raya Mangliawan Pakis. Sebuah tempat wisata yang baru saja di renovasi. Obyek wisata ini terkenal dengan sumber airnya dan kera-nya.
- Pemandian Umbulan, merupakan pemandian bernuansa pegunungan terletak di Kecamatan Dampit tepatnya di Desa Ubalan 2 Km dari pusat kota.

- Pemandian Dewi Sri, terletak di Kecamatan Pujon, menyajikan wisata pemandian air pegunungan. Wisata ini berada di dekat Pasar Pujon sebagai sentra pemasaran buah dan sayur mayur (Terminal Agribisnis Mantung).
- Pemandian Ken Dedes, terletak di Kecamatan Singosari
- Pemandian air panas Cangar, menyajikan kolam renang air panas di tengah hutan dan puncak gunung Arjuna. Kolam cukup luas, dan pemandangan menarik (banyak kera bergelayutan di dahan pohon hutan)

1.7.3 Wisata air terjun

- Air terjun Coban Rondo, terletak di Kecamatan Pujon.
- Air terjun Parang Teja di Desa Gading Kulon kecamatan Dau
- Air terjun Coban Pelangi, terletak di Kecamatan Poncokusumo.
- Air terjun Coban Glothak, terletak di Kecamatan Wagir.

1.7.4 Wisata sejarah

- Candi Singosari dan arca Dwarapala, terletak di Kecamatan Singosari,
- Candi Jago (Jayaghu) di Kecamatan Tumpang, merupakan makam Ranggawuni
- Candi Kidal di kecamatan Tumpang, merupakan makam Anusapati, perlu diketahui dimana semua candi di kabupaten Malang sebagian besar adalah peninggalan sejarah kerajaan Singhasari, kecuali beberapa situs purbakala di sekitar wilayah Dau, Wagir dan Turen merupakan peninggalan kerajaan Kanjuruhan.

1.7.5 Wisata pantai



Gambar 7 Salah satu Pantai di Kabupaten Malang

Pantai di kabupaten Malang (tahun 1907-1931)

- Donomulyo: Modangan (70 km), Ngliyep 62 km, Jonggring Saloko (69 km), Kondang Bandung, Kondang Iwak, Bantol, Nglurung, Ngebros
- Gedangan: Bajul Mati (58 km), Wonogoro (55 km), Nganteb
- Bantur: Balekambang (57 km), Kondang Merak (59 km), Kipas
- Sumbermanjing Wetan: Tamban (68 km), Rawa Indah, Tambak Asri (60 km), Sendangbiru (Segoro Anakan) (69 km)
- Tirtoyudo: Sipelot, Lenggoksono, Tangerang (70 km)
- Ampelgading: Licin (64 km)

Catatan:

Angka di dalam kurung adalah jarak dari Kota Malang

1.7.6 Wisata agro

- Kebun Teh PTPN Wonosari di kecamatan Lawang, terdapat agrowisata serta cottage yang dapat disewa jika ingin berlibur.
- Wisata petik jeruk, di desa Selorejo kecamatan Dau
- PWEC (Petungsewu Wildlife Ecosystem Conservation) di desa Petungsewu

Dau

- Wisata durian, disepanjang jalan raya Ngantang - Kasembon tepatnya di desa Pait.

1.8 Olah Raga

1.8.1 Sepak Bola

- Arema Indonesia, klub yang memang menjadi kebanggaan warga Malang Raya ini berlaga di ISL
 - Persekam / Metro FC, klub milik Pemkab Malang ini pada musim 2009 - 2010 menjuarai Divisi Satu Liga Indonesia dan pada musim 2011 akan berlaga di Divisi Utama Liga Indonesia
- kedua klub ini bermarkaskan di stadion Kanjuruhan, Kapanjen kabupaten Malang
(Wikipedia, 2012)

2.2. Potensi Perikanan Kabupaten Malang

Dari data yang diperoleh dari DKP Kabupaten Malang, Kabupaten Malang memiliki wilayah perikanan yang sangat luas yaitu terdiri dari 19 pantai (ini bisa dilihat dilampiran 2). Dengan potensi perikanan terumbu karang yang bagus dan beragam (bisa dilihat di lampiran 3). Mangrove yang berada di pantai selatan Kabupaten Malangpun juga dengan spesies yang beragam (pada lampiran 4).

Beberapa jenis mangrove yang hidup di pesisir Kabupaten Malang antara lain :



Gambar 8. Pohon Api-api



Gambar 9. Pohon Bakau



Gambar 10. Pohon Nipah

Tetapi untuk rumput laut hanya terdapat di Pantai Sipelot, Licin dan Kondang Merak. Untuk di Pantai Sipelot adalah spesies *E. cottoni*. Kondisi pantai selatan sebagian besar memiliki ombak yang besar dan arus yang kuat. Kedalaman tertinggi sebesar 6102 meter, pasang surut terendah 31 meter. Kondisi iklimnya antara lain pada temperature 22-32° celcius, angin rata-rata 1,8-4,7 km/jam, curah hujan 1.596 milimeter, tekanan udara 1.012,7 MB dan kelembaban udara rata-rata 84%. Pencemaran juga sering terjadi berasal dari Limbah kapal dan sampah antara lain oli, tumpahan bahan bakar, sampah plastik dan lain-lain terutama di daerah Pantai Pendaratan Ikan (Sendang biru). Selain itu limbah juga berasal dari Limbah tambak, ini terjadi di Pantai Pujiharjo, Tamban, Tambak Asri dan Bajulmati. Dan yang terakhir adalah pencemaran sedimen atau lumpur akibat penambangan

hutan disekitar pesisir, terutama pada musim hujan. Sedimen ini dapat merusak terumbu karang pada skala luas.

Waduk secara umum berfungsi untuk tempat wisata, irigasi, pembangkit listrik, olah raga air dan pengendali banjir sedangkan fungsi perikanan adalah sebagai penangkapan dan budidaya. Di Kabupaten Malang terdapat waduk atau Ranu atau telaga atau rawa antara lain Lahor, Sutami atau Karangkates dan sebagainya. Dan selengkapnya dapat dilihat di lampiran 6.

Waduk Karangkates Lokasinya di Kecamatan Kalipare, Pagak, Sumberpucung Luasnya 1.500 ha dengan Kedalaman : 70 m, Tinggi airnya 272-292 m dan komoditas ikan tombro, nila, mujair, tawes. Waduk Karangkates ditunjukkan pada gambar 5. Waduk Lahor, Lokasinya di Kecamatan Kromengan, luasnya 260 ha, tinggi air nya 253-272 m, Komoditas di waduk ini ikan tombro, nila, mujair, tawes. Waduk Lahor ditunjukkan pada gambar 6. Waduk sengguruh : Lokasinya di Kecamatan Kepanjen, luasnya 320 ha, tinggi air 291-292 dan komoditas nya ikan nila, mujair, tawes. Waduk Sengguruh ditunjukkan pada gambar 7. Waduk Selorejo : Lokasinya di Kecamatan Ngantang. Luas 400 ha, tinggi air : 598-620 m, Komoditasnya antara lain ikan tombro, nila, mujair, tawes, dan udang. Peta Waduk Selorejo ditunjukkan pada gambar 8.



Gambar 11. Waduk Karangates/Sutami (DKP)



Gambar 12. Waduk Lahor



Gambar 13. Waduk Sengguruh



Gambar 8. Waduk Selorejo

Untuk lebih jelasnya waduk di Kabupaten Malang ditunjukkan pada tabel 5 yaitu sebagai berikut :

NO	WADUK	LOKASI	LUAS (ha)	KEDALAMAN (m)	KETINGGIAN (dpl)	KOMODITAS
1.	Karangkates	Kec. Kalipare Kec. Pagak	1.500	70	270	Ikan Tombro, Nila, Mujair, Tawes
2.	Lahor	Kec. Sumberpucung	260	50	300	Ikan Tombro, Nila, Mujair, Tawes
3.	Sengguruh	Kec. Kromengan	320	29	296	Ikan Nila, Mujair, Tawes
4.	Selorejo	Kec. Kepanjen Kec. Ngantang	400	46	629	Ikan Tombro, Nila, Mujair, Tawes dan Udang

Tabel 5. Tabel Profil Waduk di Kabupaten Malang

Selengkapnya perairan secara umum di Kabupaten Malang ditunjukkan pada lampiran 7.

Di Kabupaten Malangpun terdapat pulau-pulau kecil baik yang sudah bernama ataupun belum memiliki nama. Daftar pulau di Kabupaten Malang selengkapnya di lampiran 8.

4.2. Profil Pantai Licin Kabupaten Malang

4.2.1. Potensi Pantai Licin Kabupaten Malang

Pantai Licin terletak di Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Terletak paling timur Kabupaten Malang berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Desa Lebakharjo dikenal sebagai Desa Pramuka. Karena di Desa Lebakharjo ini pernah dilakukan perkemahan Kwarnas Sarbini SeAsia Pasifik pada tahun 1978. Pada tahun 1993 diadakan Perkemahan Comdeca. Dan hingga sekarangpun masih sering diadakan perkemahan. Meskipun saat beberapa fasilitas perkemahan telah rusak. Seperti Pendapa disebelah rumah peristirahatan.

Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.

Desa Lebakharjo dikatakan oleh seorang bernama Ginom. Desa Lebakharjo didirikan pada tahun 1894. Pertama kali ditemukan oleh yang melakukan babat desa yaitu Soleh. Dan kemudian menjadi Kepala Desa Pertama Kepala Desa Lebakharjo Kabupaten Malang Lalu beliau menanami Desa Lebakharjo dengan jagung dan umbi-umbian. Lebak berarti dataran rendah, dan Harjo berarti makmur. Jadi Lebakharjo berarti dataran rendah yang makmur. Karena memang kontur dari Desa Lebakharjo sendiri adalah berada di lembah dataran rendah yang dikelilingi oleh gunung.

Di Desa Lebakharjo terdapat beberapa dusun antara lain Dusun Krajan IA, IB, II, Sukomaju A, B dan Lebaksari. Dengan jumlah penduduk 7.912 orang. Komposisi Mata pencaharian di Desa Lebakharjo adalah Pertanian, Perikanan, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kerja Keluar Negeri. Dan tingkat pendidikan sudah ada beberapa warga yang berpendidikan Sarjana Strata 1.

Di desa Lebakharjo ada satu daerah khusus untuk sektor perikanan yaitu Dusun Lebaksari atau biasa disebut dusun Licin. Licin berbatasan langsung dengan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Dari



Gambar 15. Jalan menuju Dusun Lebaksari melalui Tempursari (DKP, 2006)

Malang Untuk sampai di Dusun Licin bisa melewati dua jalan melewati gunung dan hutan atau memutar lewat Desa Tempursari. Dan Kedua jalan ini sama-sama sulit. Jalan menuju Licin melalui Tempursari bisa dilihat di Gambar 4.

Secara sosial, masyarakat Pantai Licin adalah daerah yang teralienasi atau jauh dari akses informasi, listrik, pendidikan. Listrik juga tergolong baru di daerah ini. Hanya sekitar 5 rumah yang memiliki penerangan listrik, sisanya memakai teknologi tenaga surya. Listrik disanapun kondisinya tidak bagus, sering terputus dan kondisi tegangan turun dan hanya digunakan pada malam hari.

Sunarsih, salah seorang warga menceritakan dalam bahasa Jawa sebagai berikut,

jembatan Gasek niko sifatipun sementara, mangke lek jawah nggih kinyut. Punika didamel swadayane tiyang-tiyang piyambak. Tiyang kang liwat jembatan punika mbayar Rp.4000,00 damel PP.

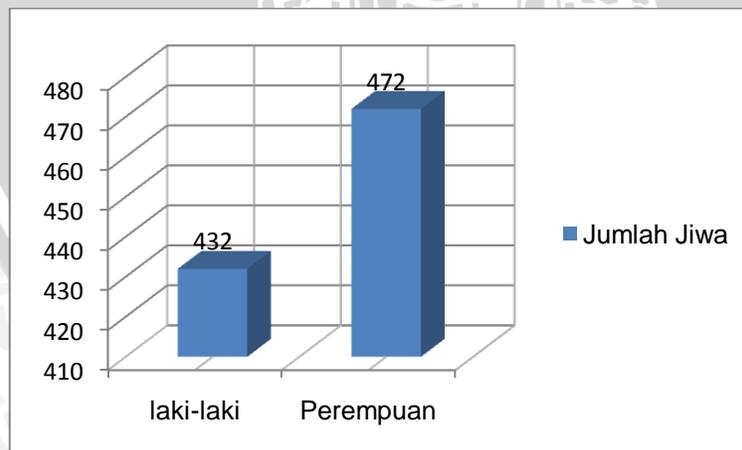
Jembatan Gasek (sebutan bagi jembatan yang dibuat warga untuk menyebrangi sungai tadah banjir untuk menghubungkan Dusun Lebaksari dengan Tempursari) itu sifatnya sementara, kalau hujan jembatannya hanyut. Jembatannya dibuat oleh swadaya warga dan setiap orang yang lewat membayar Rp. 4000, 00 PP.

Dan secara otomatis jika sudah hujan warga Licin akan kesulitan untuk keluar masuk ke tempursari. Dan sebaliknya warga lain juga kesulitan menuju dusun Licin.

Dalam segi informasi juga teralienasi. Karena berada jauh dari Desa Lebakharjo. Hanya sebagian kecil saja yang memiliki televisi, itupun harus memiliki antena parabola. Dari segi perekonomian memang termasuk dalam kategori masyarakat menengah. Dilihat dari indikator rumah-rumah yang ada disana.

Pantai Licin adalah pantai yang paling jauh diantara pantai yang ada di Kabupaten Malang Dari Malang-Dampit-Lebaksari jaraknya kurang lebih 80 km. Dan Pantai Licin adalah pantai yang terletak paling ujung timur kabupaten Malang dengan kondisi terumbu karang yang masih bagus

Jumlah penduduk Dusun Lebaksari adalah sekitar 814 orang. Dengan pembagian antara lain perempuan dan laki-laki, masing-masing 372 dan 432. Jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki bisa dilihat digambar 2 berikut :



Gambar 16. Grafik Jumlah Penduduk Di Pantai Licin Kabupaten Malang

Hasil perikanan di Daerah Licin Kabupaten Malang adalah tongkol (*Thunnus alalunga*), layur (*Trichiurus lepturus*) dan lemuru (*Sardinella sp*) serta rumput laut. Potensi Perikanan sebagaimana di Pantai Selatan Kabupaten Malang memang masih sangat besar.

Selain itu tercatat di Licin Terdapat 47 Nelayan, 33 Kapal. Dan jenis perikanan tangkap yang dilakukan adalah skala kecil. Dengan menggunakan alat yaitu jukung yang telah dilengkapi dengan motor.

Profil Pantai Licin Kabupaten Malang secara singkat digambarkan dalam tabel 5 :

NO	URAIAN	KONDISI
1	Kecamatan	Ampelgading
2	Potensi	Pantai luas
3	Aksebilitas a. Rute b. Jarak c. Jalan d. Lebar e. Moda	Malang-Dampit-Lebaksari ± 80 Km Hotmix, macadam 3-8 m Bus, Jeep 4 WD,ojek
4	Fasilitas dan Utilitas	Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Warung Makanan, Tandon Air
5	Potensi penunjang	Tidak ada
6	Jenis kegiatan	Berkemah, jalan-jalan menikmati pemandangan
7	Kondisi Terumbu Karang	Bagus
8	Sungai	K. Glidik
9	Jenis hutan bakau (mangrove)	Tanjang (<i>Rhizophora spp</i>)
10	Estuari	-
11	Potensi Pencemaran	Sedimentasi Pasir Gunung Semeru
12	Potensi Bencana	Tsunami, banjir lahar

Tabel 6. Profil Pantai Licin Kabupaten Malang

4.2.2. Proses Produksi

- Ikan

Ikan yang dihasilkan antara lain tongkol (*Thunnus alalunga*), layur (*Trichiurus lepturus*) dan lemuru (*Sardinella sp*)

Proses produksi di Pantai Licin Kabupaten Malang adalah dengan ekstraktif atau mengambil langsung dari laut. Karena laut sifatnya adalah

commonproperty. Penangkapan ikan di Pantai Licin dengan kapal dan jaring. Dipinggir pantai banyak laki-laki yang memancing ikan.

Ketika kapal telah bersandar anak buah kapal beserta istri ngili atau mengambil ikan dari jaring. Lalu dimasukkan kedalam *coolbox* dan diantarkan ke pedagang ikan.

- rumput laut (*Laminaria japonica*)

Sedangkan untuk rumput laut tinggal memanen dipinggir Pantai Licin. Dimasukkan kedalam karung dan dijemur dipinggir pantai.

Aktivitas Produksi untuk penangkapan ikan dilakukan oleh laki-laki seperti ditunjukkan pada gambar 3. Untuk pemanenan rumput laut oleh perempuan dibantu oleh anak-anak mereka.



Gambar 17. Nelayan sedang bersiap-siap berangkat menangkap ikan

4.2.3. Proses Pengolahan

Setelah ikan ditangkap ikan diberi perlakuan yaitu pemanasan diatas tungku serta penggaraman dan pemberian Tujuannya hanya sebatas memperpanjang waktu busuk atau *post rigor*. yaitu penggaraman dan

pemberian es. Sedangkan diversifikasi produk tidak ada. Sebenarnya terdapat fasilitas untuk pemindangan ikan. Dan masyarakat masih memergunakannya sampai saat ini. Bentuknya pengeringan dan penggaraman. Bangunan untuk pemindangan ikan bisa dilihat di gambar berikut :



Gambar 18. Tempat pemindangan ikan (Bagian dalam). (DKP, 2006)



Gambar 19. Bagian Dalam Tempat Pemindangan Ikan Yang Kurang Terawat (DKP, 2006)

4.2.4. Proses Pemasaran

Di Licin Jaya terdapat Tempat Pelelangan Ikan yaitu tempat untuk melelang ikan. Akan tetapi fasilitas ini tidak difungsikan. Mengingat hanya ada 2 (dua) pedagang pengepul ikan. Dan kondisinya pun kurang terawat.

Seorang pedagang pengepul ikan bercerita sebagai berikut,

Biaya damel distribusi punika kathah sanget satunggal jalan punika Rp. 350.000,00. Dipasarakenne ten Tirtoyudo. (Biaya distribusinya sangat tinggi satu kali jalan Rp.350.000,00. Dan tempat pemasarannya di Tirtoyudo)

4.3. Profil Gender Masyarakat sekitar Pantai Licin Kabupaten Malang

4.3.1. Profil Aktivitas Berdasarkan Gender Pantai Licin Kabupaten Malang

Aktivitas masyarakat dibagi 3 yaitu aktivitas produktif, reproduktif dan sosial kemasyarakatan. Aktivitas produktif adalah aktivitas yang jika dikerjakan menghasilkan pendapatan. Sebaliknya aktivitas reproduktif adalah aktivitas yang jika dikerjakan maka tidak menghasilkan pendapatan. Aktivitas sosial kemasyarakatan merupakan aktivitas yang dibutuhkan seseorang untuk berinteraksi dengan masyarakat lebih luas. (Riniwati et al, 2010).

Aktivitas produktif dalam bidang perikanan meliputi penangkapan ikan (dengan alat tangkap jala dan pancing), pemanenan rumput laut, termasuk menyiapkan peralatan penangkapan sedangkan reproduktif contohnya menyiapkan bekal untuk melaut. Sosial kemasyarakatan seperti pertemuan nelayan dan sebagainya.

Pada waktu panen perempuan selalu menunggu suami di pantai untuk menjemput suami (Gambar 6). Tujuannya adalah tidak sekedar menunggu kedatangan suami akan tetapi juga untuk membantu *ngili* atau mengambil ikan dari jaring untuk dikumpulkan juga menjaga hasil

tangkapan dari para *pengojur* atau peminta-minta ikan. Pengojur di Pantai Licin kebanyakan adalah orang tidak berasal dari Dusun Licin sendiri akan tetapi dari daerah lain. Dalam aktivitas ngili perempuan dan laki-laki bekerja sama untuk menyelesaikannya seperti yang terlihat di gambar 7.



Gambar 20. Para perempuan mapag (menjemput) suami di Pantai



Gambar 21. Perempuan dan Laki-laki bekerja sama Untuk Ngili (mengambil) ikan dari jaring



Gambar 22. Perempuan dan Laki-laki Memanen Rumput Laut

Aktivitas reproduktif dilakukan oleh perempuan. Sedangkan aktivitas keagamaan dilakukan oleh dua jenis kelamin dan aktivitas sosial kemasyarakatan dilakukan oleh laki-laki. Seperti di kehidupan pesisir Pantai Licin Sendiri terdapat sebuah organisasi nelayan yang di sebut POKMASWAS Perikanan (Persatuan Masyarakat Pengawas Perikanan). Dalam organisasi inilah pengambilan keputusan terhadap sumberdaya perikanan dilakukan. Termasuk konservasi sumberdaya perikanan dilakukan oleh persatuan ini. Menurut Kabag Pengelola Sumberdaya Perikanan, Pokmaswas ini didirikan oleh DKP, sedangkan menurut Ketua Pokmaswas, Pokmaswas di dirikan atas inisiatif masyarakat sendiri artinya kesadaran masyarakat sendiri. Pokmaswas ini beranggotan 13 orang yang keseluruhan adalah laki-laki. Ini memperlihatkan bahwa disini terdapat bias jender. Yang dianggap mampu untuk menjadi pengawas adalah perempuan. Ini berarti partisipasi perempuan dalam pembangunan perikanan tidak ada. Padahal organisasi berbentuk Pokmaswas ini dapat menjadi sarana pembangunan perikanan Laki-laki dan

perempuan sama-sama memutuskan yang sama dalam penggunaan sumberdaya perikanan.

Jadwal kegiatan salah satu keluarga di Licin ketika sedang tidak musim ikan ditunjukkan dengan tabel 7 yaitu sebagai berikut :

Jam	Kegiatan	
	P.Gianto	B.Mujiati
04.00-07.00	Bangun	Bangun, memasak
07.00-17.00	Ke ladang atau Kebun	Ke ladang atau Kebun
17.00-18.00	Istirahat	Memasak
18.00-20.00	Nonton televisi	Nonton Televisi
20.00-04.00	Tidur	Tidur

Tabel 7. Jadwal Kegiatan P. Gianto dan B. Mujiati ketika sedang tidak musim ikan

Sedangkan Jadwal Kegiatan Ketika sedang Musim Ikan ditunjukkan dengan tabel 8.

Jam	Kegiatan	
	P. Gianto	B. Mujiati
04.00-07.00	Tidur	Bangun, memasak
07.00-10.00	Bersiap-siap, berangkat ke laut	Ke ladang atau Kebun
10.00-16.00	Pulang melaut, ngili, menjual ikan kepada pedagang	Mapag Suami dan membantu suami di pantai
17.00-18.00	Istirahat	Memasak
18.00-20.00	Nonton televisi	Nonton Televisi
20.00-04.00	Tidur	Tidur

Tabel 8. Jadwal Kegiatan P. Gianto dan B. Mujiati ketika musim ikan

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa aktivitas produktif lebih didominasi oleh laki-laki. Sedangkan perempuan sifatnya hanya membantu, Sedangkan domestik sepenuhnya dilakukan oleh perempuan.

4.2.2. Profil Akses dan Kontrol terhadap Sumberdaya Perikanan

Akses adalah wewenang menggunakan sumberdaya yang dimiliki, namun tidak mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan. Sumberdaya dikelompokkan menjadi sumberdaya alam, manusia dan buatan. Sumberdaya alam dalam bidang perikanan antara lain tanah, laut, ikan, air. Sumberdaya manusia adalah semua tenaga kerja. Sedangkan yang termasuk

sumberdaya buatan antara lain teknologi, pasar, informasi, program kredit, program pelatihan, dan lain-lain (Riniwati, et al 2010). Dari hasil penelitian akses perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Akses sumberdaya ikan didominasi oleh laki-laki. Perempuan pada ngili, pengolahan dan pemasaran ikan. Laki-laki pada penangkapan ikan, ngili, pengolahan dan pemasaran. Sumberdaya laut oleh laki-laki.

Selain itu Dari FGD yang telah dilakukan oleh peneliti. jumlah informan yang didapat untuk perempuan sangat sulit dikumpulkan karena pada jam-jam tersebut para perempuan sedang pergi ke ladang dan lelaki sedang istirahat. Kondisi ini tentu sudah terlihat bahwa jam istirahat perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Contohnya adalah saat ada Diskusi Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat yang dilaksanakan Oleh DKP pada tahun 2006. Kegiatan tersebut hanya untuk laki-laki. Ini memperlihatkan bahwa perempuan dan laki-laki mengalami ketidakadilan gender. Kegiatan bisa dilihat pada gambar 9.

.Kontrol adalah pengawasan dan pengambilan keputusan terhadap sumberdaya. Kontrol terhadap sumberdaya dilakukan oleh laki-laki.



Gambar 23. Peserta Diskusi PLBM semuanya adalah laki-laki (DKP, 2006)



Gambar 24. Suasana FGD



Gambar 25. Peneliti dan Para Peserta FGD, hanya satu perempuan yang berpartisipasi

4.2.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan aktivitas, kontrol, akses, dan manfaat

✚ Budaya

Paradigma masyarakat bahwa perempuan memiliki kodrat bekerja di ruang domestik sedangkan publik adalah ranah laki-laki, baik keagamaan dan sosial.

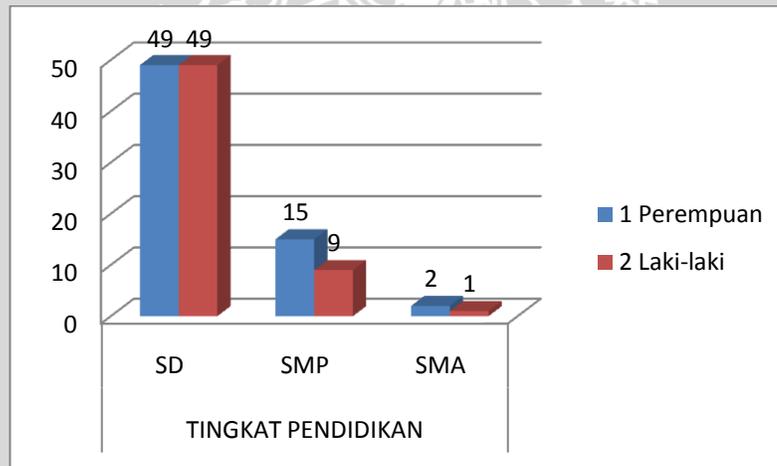
✚ Ekonomi

Alasan ekonomi sering menjadi alasan perempuan terjun ke sektor publik.

✚ Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan maka dia akan semakin berpengaruh terhadap aktivitas, akses, kontrol dan manfaat.

Data Pendidikan berdasarkan jenis kelamin di Pantai Licin Kabupaten Malang adalah sebagai berikut Untuk tingkat SD jumlah yang seimbang Perempuan 49 orang dan laki-laki 49 orang, Untuk SMP Perempuan yang bersekolah sebanyak 15 dan laki-laki 9, Untuk SMA perempuannya sebanyak 2 orang dan laki-laki 1 orang. Grafik tingkat pendidikan berdasarkan jenis kelamin digambarkan pada gambar



Gambar 26. Tingkat Pendidikan berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah masyarakat pada tingkat SD terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Dalam jumlah perempuan yang lebih banyak terdapat jumlah anak perempuan yang sama antara laki-laki dan perempuan di SD. Sedangkan pada masing-masing tingkat pendidikan SMP dan SMA di TPI Licin

Jaya Kabupaten Malang lebih tinggi perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Ini berbanding lurus dengan jumlah laki-laki masyarakat Licin yang jauh lebih sedikit dibandingkan perempuan. Ini berarti pemerataan gender antara laki-laki dan perempuan di Licin Jaya masih belum terwujud.

Selain itu, rata-rata perempuan dan laki-laki disana menikah pada usia yang masih muda. Dimana laki-laki belum ada kesiapan dari mental dan fisik. Sedangkan perempuannya sendiri juga belum siap untuk mendapatkan anak. Seperti yang dilakukan oleh Edi dan Istrinya yang menikah muda belum genap 20 tahun. Ini bisa disebabkan karena miskinnya informasi mengenai hal ini.

Triono menceritakan yang anak pertamanya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita Keluar Negeri. dan berusia 24 tahun. Sekitar 2 tahun 8 bulan anaknya bekerja ke luar negeri yaitu Thailand. Menurut Triono anaknya bekerja ke Luar Negeri karena kemauannya sendiri. Triono yang bekerja sebagai nelayan dulunya, kini meninggalkan pekerjaan tersebut menjadi Ketua Pokmaswas yang bekerja di Kantor Kepala Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Dan kini anak laki-lakinya, yang menggantikannya.

Ini memperlihatkan bahwa konsep Perikanan sebagai *Primemover* Perekonomian ternyata dalam skala mikro belum terealisasi. Resiko perempuan bekerja ke luar negeri kini telah tercium publik bahwa risikonya sangat besar. Ini bergaris lurus dengan bekerja sebagai nelayan yang juga memiliki tingkat resiko yang tinggi.

Informan yang pertama adalah keluarga dari Bapak Gianto dan Bu Mujiati. Berprofesi sebagai nelayan sekaligus petani. Bu Mujiati sebagai Ibu rumah tangga, petani juga membantu Pak Gianto Mengambil ikan dari Jaring ketika musim menangkap ikan.

d. Informasi

Keluarga yang kedua sebagai subyek penelitian adalah Keluarga Pak Sasminto Keluarga Kedua yaitu Pak Sasminto tinggal bertiga dengan Istri dan

seorang anak perempuannya. Sebenarnya Pak Sasminto memiliki seorang anak gadis lagi tetapi dia tinggal bersama Kakek Neneknya. Istrinya bernama Sunarsih, anaknya yang kedua masih duduk di Bangku SMP bernama Siti Juleha. Dan yang terakhir masih duduk di bangku Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bernama Santi. Pak Sasminto masih berusia 26 Tahun dan Bu Sunarsih berusia 31 Tahun. Pak Sasminto bermatapencaharian sebagai sopir truk pengangkut ikan, Terkadang suka memancing di pinggir pantai Licin. Bu Sunarsih sendiri sebagai petani. Dulu Bu Sunarsih pernah menjadi TKI Luar Negeri (Arab), tapi kemudian pulang dan memiliki anak yaitu Santi. Rencananya Bu Sunarsih akan kembali bekerja ke Luar Negeri menunggu sampai Santi siap untuk ditinggalkan. Dan pada keluarga inipun terjadi hal yang sama double burdent pada istri. Meskipun sifatnya hanya membantu akan tetapi ini tidak dilakukan sebaliknya oleh laki-laki. Suami tidak membantu pekerjaan domestik atau reproduktif perempuan. Dan ini berarti terjadi ketidakadilan gender.

Secara ringkas profil aktivitas, kontrol, akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki ditunjukkan pada tabel berikut :

No	Variabel Harvard	Unit Analisis	
		Perempuan	Laki-laki
1	Profil Aktivitas		
	a. Aktivitas produktif		
	• Perikanan	Pengolahan ikan, ngili ikan, pemasaran ikan ke pedagang ikan, pemasaran ikan daerah yang lain	Penangkapan ikan, ngili, pengolahan ikan pemasaran ikan ke pedagang ikan, pemasaran ikan daerah yang lain
	• Non-Perikanan	Pertanian, warung	Pertanian
	b. Aktivitas reproduktif	Memasak, merawat anak, membersihkan rumah	-

	c. Aktifitas Sosial-Kemasyarakatan K	-	Organisasi
e	2 Profil akses, manfaat dan pengambilan keputusan terhadap sumberdaya	-	Pendapatan, informasi, pelatihan, penyuluhan,
a b e	3 Faktor yang mempengaruhi kondisi pada profil aktivitas, akses terhadap sumberdaya dan pengambilan keputusan	- Budaya yang mengkonstruksi perempuan harus berada di sektor domestik dan sebaliknya Pendidikan Ekonomi	

9Tabel Tabel 9 Tabel Analisis Harvard

8. Aplikasi Analisis Harvard

Kegiatan DKP Kabupaten Malang pada Kegiatan Pelatihan (Pembinaan) Ibu-ibu alternatif untuk memberdayakan perempuan. Menurut hemat penulis ini memang penting dilakukan agar pengetahuan para perempuan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan bisa meningkat. Akan tetapi perlu di rijing kembali bagaimana bentuk dari pelatihan ibu-ibu alternatif tersebut apakah itu pelatihan pembuatan abon atau seperti apa. Serta perlu adanya komitmen dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Karena di tahun 2010 kebijakan tersebut telah terprogram. Akan tetapi belum terimplementasi. Kini ditahun 2011 kembali diprogramkan. Semoga ini tidak hanya menjadi program kegiatan saja.

Agar lebih mempermudah bisa pelatihan ibu-ibu alternatif dipisah dalam program tersendiri. Agar program ini bisa dijalankan dengan baik. Apalagi program ini bukan termasuk pemberdayaan ekonomi. Akan tetapi pemberdayaan manusia yang dalam hal ini konteks perempuan. Pemberdayaan sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai obyek ataupun subyek pemberdayaan. Selain sebagai obyek seperti yang tercantum dalam Program

Kerja DKP. Perlu diadakan perempuan sebagai subyek pembangunan dari daerahnya sendiri. Karena jumlah perempuan di Dusun Licin lebih besar dibandingkan laki-laki. Jika perempuan ikut serta dalam pembangunan maka akan menambah dari segi kuantitas. Akan tetapi dari kualitas memang masih tertinggal dari aspek pendidikan dan akses misalnya. Hal ini hanyalah sebuah paradigma di masyarakat desa bahwa perempuan hanya berjuang dirumah domestik sehingga aspek pendidikan dan akses perempuan menjadi berbeda sehingga partisipasi perempuan dalam pembangunan menjadi kurang.

Diperlukan pelaksanaan advokasi pendidikan perempuan melalui program penyuluhan untuk orang tua (nelayan dan masyarakat) yang dilaksanakan pada tahun 2012 untuk meningkatkan kesadaran orangtua untuk memberikan pendidikan dan mendorong pendidikan pada anak-anak khususnya anak perempuan. Dan tentunya harus dilakukan monitoring dan evaluasi tujuannya agar dapat terlaksana dengan baik.

Pola pikir adalah bentukan budaya yang terjadi secara terus menerus dan mengakar sehingga untuk mengubahnya perlu waktu dan proses yang panjang. Dan program yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan penyuluhan untuk memberikan kesadaran mengenai tidak ada pembagian kerja yang mutlak antara laki-laki dan perempuan. Pola pembangunan perlu lintas sektor. Jika memang DKP sendiri tidak menangani hal ini, ini dapat dilakukan dengan kerja sama dengan akademisi.

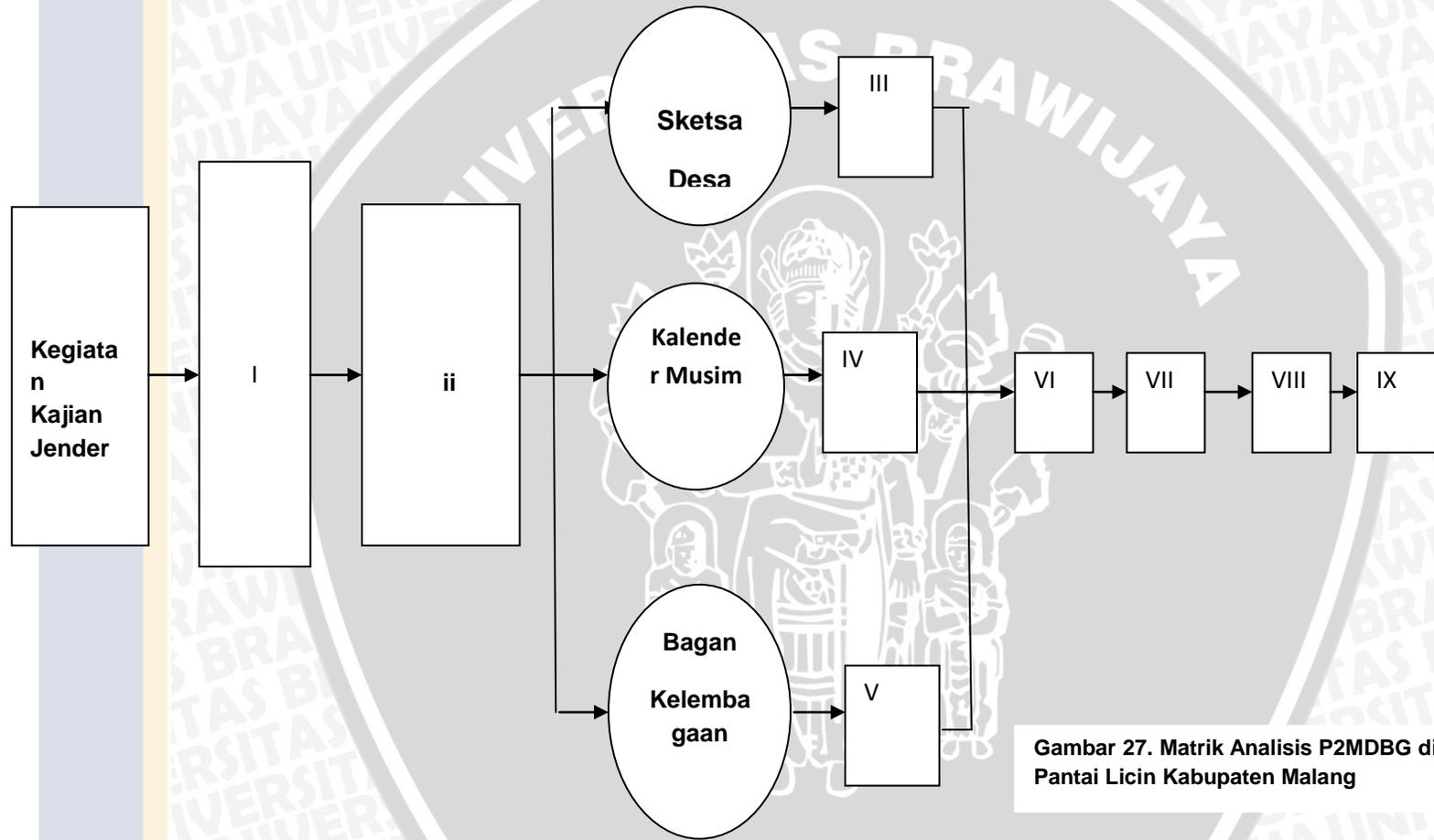
- a. Perencanaan Pembangunan Wilayah Perikanan Berwawasan Gender di Licin Jaya Kabupaten Malang

Untuk mengambil data yang dibutuhkan mengambil dari Focus Group Discussion yang dilaksanakan dengan warga Dusun Lebaksari pada hari Minggu, 1 Oktober 2011 Jam 10.00 WIB. Warga berjumlah 7 (Tujuh) orang

terbagi atas 1 (satu) orang perempuan dan 7 (tujuh) orang laki-laki, 5 (lima) orang berprofesi sebagai nelayan, 1 (satu) orang Ketua Pokmaswas, 1 (satu) orang istri nelayan. Warga tersebut antara lain, Wagimin, Triono, Bambang Sutrisno Hadi, Sulistyono, Gianto dan Mujiati. Dua nama terakhir adalah pemilik rumah tempat dilaksanakan FGD.



Matriks Analisis P2MDBG



Gambar 27. Matrik Analisis P2MDBG di Pantai Licin Kabupaten Malang

I. Profil Gender

- Profil Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan Laki-laki di Licin yaitu menjadi nelayan, ngili, pemasaran, menanam jagung dan padi, mengurus lahan. Sedangkan Perempuan, memasak, mengurus anak, ngili, pemasaran ikan, menanam padi dan jagung, mengurus lahan,

- Profil Peluang dan dan penguasaan atas sumberdaya perikanan

Peluang dan sumberdaya Perempuan untuk pengelolaan sumberdaya perikanan lebih kecil dibandingkan laki-laki

-Profil Kajian Partisipasi

Partisipasi perempuan dalam keorganisasian, pembangunan dan konservasi sumberdaya perikanan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki

- Profil Dampak

Dampak terjadi akibat pembagian kerja, peluang dan penguasaan sumberdaya perikanan dan partisipasi perempuan dan laki-laki adalah terjadinya bias gender dan *double burdent* pada perempuan.

II. Masalah Gender

- Bias gender
- *Double Burdent*
- Stereotip perempuan
- Kesenjangan Perempuan dan laki-laki dalam pendidikan

III. Sketsa Desa

- Kondisi jalan
- Kondisi Pelabuhan
- Kebutuhan Listrik
- Kebutuhan Jembatan

- Perhatian pemerintah, peneliti dan lain-lain yang kurang
- Dianaktirikan dengan pelabuhan sendangbiru
- Kegiatan tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah
- Kesadaran dari warga untuk menjaga fasilitas yang ada

IV. Kalender Musim

- Musim Ikan
- Musim Singkong
- Musim Padi

V. Badan Kelembagaan

Badan kelembagaan yang terdapat di Dusun Licin antara lain : Pokmaswas, PKK, dan KUD

VI. Permasalahan dan Potensi

Dari hasil *Focus Group Discussion* yang telah dilaksanakan dengan masyarakat menyimpulkan bahwa permasalahan dan potensi adalah seperti gambar berikut :

No	Permasalahan	Potensi
1.	Kondisi jalan	Dana, Sumberdaya Manusia, Gotongroyong
2.	Kondisi Pelabuhan	Dana, Sumberdaya Manusia, gotongroyong
3.	Perhatian pemerintah, peneliti dan lain-lain yang kurang	Dana, Sumberdaya Manusia
4.	Kebijakan perikanan tidak menyentuh Pantai Licin	Dana
5.	Kerugian yang diderita oleh nelayan akibat ngojur	Dana
6.	Pengajuan proposal pembangunan tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah	Kemauan dan semangat dari perangkat desa
7.	Pemberian bantuan kapal dirasa kurangtepat bagi masyarakat	Program, dana dari pemerintah

Tabel 10. Permasalahan Dan Potensi

Dengan kondisi jalan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan dua akses jalan masuk Dusun Licin yang melalui bukit dan Tempursari keduanya dengan kondisi yang sangat sulit. Sehingga transportasi menjadi terhambat, termasuk transportasi distribusi ikan. Selain itu Licin menjadi terisolir dari dunia luar.

Pembangunan jalan yang selama ini dilakukan Pemerintah dilatarbelakangi oleh seringkali adanya pelaksanaan perkemahan Pramuka di Lebakharjo. Sehingga pembangunan fisik jalan hanya terbatas dari Ampelgading menuju Lebakharjo sedangkan menuju Lebaksari Licin tidak dilakukan pembangunan jalan . Pembangunan ini termasuk pembangunan jembatan permanen diatas Kali Glidik untuk memperlancar transportasi. Untuk pembangunan jalan menuju Licin adalah sumberdana dari pemerintah Kabupaten Malang, Sumberdaya manusia di Licin dan kuatnya gotongroyong di daerah ini. Oleh sebab itu pembangunan jalan sangat mungkin dilakukan.

Kondisi pelabuhan juga menjadi perhatian dalam *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan oleh penulis bersama masyarakat Pantai Licin Kabupaten Malang, baik perempuan dan laki-laki, masyarakat menginginkan pembangunan fisik pelabuhan untuk mempermudah dalam penangkapan serta tersentuh kebijakan. Karena selama ini, mulai dari Revolusi Biru sampai dengan Minapolitan Pantai Licin tidak pernah tersentuh. Karena memang kebijakan hanya ditujukan pada pelabuhan besar, Di Kabupaten Malang yaitu Sendang Biru. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada penulis. Sedangkan Dari hasil observasi yang dilakukan, penulis melihat bahwa fasilitas-fasilitas di Licin banyak yang sudah kurang layak. Ini disebabkan oleh perhatian dari masyarakat Pantai Licin sendiri serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan Pokmaswas Licin yang kurang. Untuk pembangunan an Pantai Licin dari status sandar ikan menuju pelabuhan oleh pemerintah percuma dilaksanakan jika tidak dibarengi komitmen masyarakat dan pemerintah untuk menjaga dan memperbaiki fasilitas yang telah ada adalah keputusan yang terbaik. Serta komitmen untuk menjaganya secara berkelanjutan sehingga fasilitas bisa digunakan terus menerus. Potensi yang ada untuk permasalahan ini adalah Sumberdana yang cukup menurut Pemerintah Kabupaten Malang akan tetapi pertimbangan diatas perlu

diperhatikan. Sumberdaya manusia Licin dan sistem gotongroyong bisa menjadi pendukung.

Berkaitan dengan kondisi jalan yang sulit dan jauh dari jalan besar, listrik yang masih baru di daerah ini sehingga pemerintah dan peneliti jarang membuat kebijakan, peninjauan dan penelitian. Pemkab Malang tercatat terakhir melakukan kegiatan pada tahun 2006 sedangkan penelitian sudah lama sekali oleh seseorang yang studi salah satu universitas di Jepang.

Ketika penulis melontarkan pertanyaan awal mengenai kebijakan di Indonesia. Mulai revolusi biru hingga minapolitan, masyarakat mengaku tidak pernah mendengar kebijakan tersebut apalagi menyentuh di Licin. Apakah memang kebijakan tersebut hanya diberikan pada pantai-pantai besar?. Sama halnya menurut DKP Kabupaten Malang bahwa kebijakan Minapolitan hanya dilakukan bagi pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Potensi yang ada sumberdana yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten malang seharusnya menjadi pendukung.

Masalah yang muncul dalam FGD yang terlontar dari masyarakat adalah masalah pengojur. Pengojur atau peminta-minta ikan selalu ada selama nelayan menyandarkan perahu setelah menangkap ikan. Pengojur mayoritas adalah orang-orang yang berasal dari daerah lain. Kerugian dialami oleh masyarakat akibat pengojur. Hal ini disebabkan para pengojur mengambil ikan terlalu banyak dari pemiliknya. Masyarakat hanya mengandalkan para istri untuk menjaganya. Dengan alasan para perempuan yang selalu cerewet dengan para pengojur sehingga timbul rasa sungkan dari para pengojur. Hemat penulis disinilah tentu peran dari Pokmaswas seharusnya digunakan, untuk mengawasi kegiatan perikanan di Pantai Licin. Tentunya tidak menafikan peran dari para perempuan sendiri. Justru disini memperlihatkan bahwa peran perempuan dalam perekonomian keluarga sangat penting. Digunakan semaksimal mungkin peran dari perempuan dan Pokmaswas.

Masyarakat seringkali juga mengirimkan proposal kegiatan atau proposal permohonan dana pembangunan di Licin. Tetapi sampai dengan hari ini belum ada tanggapan dari pemerintah. Potensi yang ada adalah kemauan keras dari perangkat desa. Selain itu beberapa waktu yang lalu Licin juga mendapatkan bantuan kapal dari pemerintah. Akan tetapi kapal tersebut 'mangkrak' atau tidak digunakan oleh masyarakat. Karena nelayan sudah memiliki kapal masing-masing. Tujuan pemerintah memberikan kapal adalah untuk memacu agar lebih banyak masyarakat yang menjadi nelayan. Akan tetapi rupanya minat masyarakat untuk menjadi nelayan tidak ada. Potensi penyelesaian masalah tersebut adalah program penyuluhan yang diadakan oleh DKP tentang potensi menjadi nelayan terhadap perekonomian keluarga. Serta dana yang dimiliki oleh pemerintah.

VII. Daftar Peringkat Masalah di Licin dapat dilihat di tabel 10.

No	Masalah	Di rasakan oleh banyak orang	Menghambat peningkatan pendapatan	Sering terjadi	Tersedia potensi untuk memecahkan masalah	Jumlah nilai	Urutan Peringkat
1.	Kondisi Pelabuhan	7	7	7	7	28	1
2	Kondisi jalan	7	7	6	6	26	2
3	Perhatian pemerintah, peneliti dan lain-lain yang kurang	1	2	3	4	10	5
4	Pengajuan proposal pembangunan tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah	1	3	4	1	9	6
5	Kebijakan perikanan tidak menyentuh Pantai Licin	1	1	1	1	4	7

6	Pemberian bantuan kapal dirasa kurangtepat bagi masyarakat	5	6	5	1	17	4
7	Kerugian yang diderita oleh nelayan akibat ngojor	7	7	5	5	24	3

Tabel 11. Daftar Peringkat Masalah di Licin

Berdasarkan hasil dari FGD yang telah dilakukan dari 7 orang narasumber didapatkan untuk kondisi pelabuhan dampaknya dirasakan oleh 7 orang. Dikatakan oleh 7 orang bahwa hal ini menghambat pendapatan. 7 orang mengatakan bahwa hal ini sering terjadi. Dan 7 orang berpendapat bahwa terdapat potensi untuk memecahkan masalah tersebut.

Masalah Kondisi jalan dampaknya dirasakan oleh 7 orang. Dikatakan oleh 7 orang bahwa hal ini menghambat pendapatan. 6 orang mengatakan bahwa hal ini sering terjadi. Dan 6 orang berpendapat bahwa terdapat potensi untuk memecahkan masalah tersebut.

Masalah Perhatian pemerintah, peneliti dan lain-lain yang kurang dampaknya dirasakan oleh 1 orang. Dikatakan oleh 2 orang bahwa hal ini menghambat pendapatan. 3 orang mengatakan bahwa hal ini sering terjadi. Dan 4 orang berpendapat bahwa terdapat potensi untuk memecahkan masalah tersebut.

Masalah Pengajuan proposal pembangunan tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. dampaknya dirasakan oleh 1 orang. Dikatakan oleh 3 orang bahwa hal ini menghambat pendapatan. 4 orang mengatakan bahwa hal ini sering terjadi. Dan 1 orang berpendapat bahwa terdapat potensi untuk memecahkan masalah tersebut.

Masalah Kebijakan perikanan tidak menyentuh Pantai Licin dampaknya dirasakan oleh 7 orang. Dikatakan oleh 7 orang bahwa hal ini menghambat pendapatan. 7 orang mengatakan bahwa hal ini sering terjadi. Dan 7 orang berpendapat bahwa terdapat potensi untuk memecahkan masalah tersebut.

Masalah Pemberian bantuan kapal dirasa kurangtepat bagi masyarakat dampaknya dirasakan oleh 5 orang. Dikatakan oleh 6 orang bahwa hal ini menghambat pendapatan. 5 orang mengatakan bahwa hal ini sering terjadi. Dan 1 orang berpendapat bahwa terdapat potensi untuk memecahkan masalah tersebut.

Masalah Kerugian yang diderita oleh nelayan akibat ngojur dampaknya dirasakan oleh 7 orang. Dikatakan oleh 7 orang bahwa hal ini menghambat pendapatan. 5 orang mengatakan bahwa hal ini sering terjadi. Dan 5 orang berpendapat bahwa terdapat potensi untuk memecahkan masalah tersebut.

Dari semua permasalahan yang ada, bisa dijumlahkan masalah Kondisi Pelabuhan 28, Kondisi jalan 26 Perhatian pemerintah, peneliti dan lain-lain yang kurang 10. Pengajuan proposal pembangunan tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah 9. Kebijakan perikanan tidak menyentuh Pantai Licin 4. Pemberian bantuan kapal dirasa kurangtepat bagi masyarakat 17. Kerugian yang diderita oleh nelayan akibat ngojur 24.

Melalui jumlah angka yang terbesar hingga terkecil masalah dihadapi oleh masyarakat dapat diperingkatkan berdasarkan kepentingannya antara lain :

1. Kondisi Pelabuhan
2. Kondisi Jalan
3. Kerugian yang diderita nelayan akibat pengojur
4. Pemberian bantuan kapal dirasakan masyarakat kurang tepat sasaran

5. Perhatian pemerintah dan peneliti dan lain-lain dirasa kurang
6. Pengajuan Proposal pembangunan tidak dilanjutkan oleh pemerintah
7. Kebijakan perikanan tidak menyentuh Pantai Licin

VIII . Daftar Pengkajian Tindakan bisa dilihat pada tabel 12 berikut :

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif pemecahan masalah	Tindakan yang layak
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Kondisi Pelabuhan	Perhatian dari masyarakat terhadap fasilitas yang ada	- Gotong Royong - Ketersediaan Dana	Masyarakat berkomitmen menjaga fasilitas yang ada	Masyarakat berkomitmen menjaga fasilitas yang ada
2	Kondisi jalan	Belum adanya pembangunan jalan	- Gotongroyong - Ketersediaan Dana	Program Pembangunan Jalan ke Licin	Program Pembangunan Jalan Licin
3	Perhatian pemerintah, peneliti dan lain-lain yang kurang	Jalan yang sulit	- Pembangunan Jalan - Gotong royong	- Program Pembangunan Jalan ke Licin - Komitmen dari pemerintah atau peneliti	Program Pembangunan Jalan Licin
4	Pengajuan proposal pembangunan dari masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah	Bisa jadi dana dari pemerintah	- Komitmen perangkat desa	Diskusi antara masyarakat dan Pemerintah akan pentingnya kegiatan tersebut	Diskusi antara masyarakat dan Pemerintah akan pentingnya kegiatan tersebut
5	Kebijakan perikanan tidak menyentuh Pantai Licin	Bukan merupakan Pelabuhan Pantai	Kebijakan Kabupaten Malang	Kebijakan DKP dan Bapeda Kabupaten Malang	Kebijakan DKP dan Bapeda Kabupaten Malang
6	Pemberian bantuan kapal dirasa kurang tepat bagi masyarakat	Banyak yang sudah memiliki kapal	Kebijakan pemerintah yang lainnya	- Kebijakan yang bottom up - Sosialisasi atau penyuluhan tentang potensi menjadi nelayan di Licin	Sosialisasi atau penyuluhan tentang potensi menjadi nelayan di Licin

7	Kerugian yang dialami nelayan	Banyak pengojur	Pokmaswas, Perempuan	- Optimalisasi peran pokmaswas - Peran perempuan	Peran perempuan untuk mengontrol
---	-------------------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------

Gambar 12. Pengkajian Tindakan

Permasalahan Kondisi pelabuhan disebabkan oleh perhatian dari masyarakat untuk menjaga fasilitas dan pengawasan dari pemerintah yang kurang. Pada waktu diskusi masyarakat terfokus pada hal ini. Potensi adalah gotong royong dan pendanaan. Alternatif pemecahan masalah adalah masyarakat berkomitmen menjaga fasilitas yang ada. Dan tindakan yang layak dilakukan adalah masyarakat berkomitmen menjaga fasilitas yang ada.

Permasalahan yang kedua adalah kondisi jalan di Licin. Masalah ini disebabkan oleh pembangunan jalan selama ini hanya sampai pada Desa Lebakharjo saja untuk kebutuhan kegiatan perkemahan, sedangkan untuk kebutuhan masyarakat pesisir di Licin masih terabaikan. Sehingga akses masuk menuju Licin sangat sulit. Ada dua jalan menuju Licin yaitu lewat Tempursari Lumajang atau lewat gunung dan dua jalan itu berat dan tidak dapat dilewati oleh kendaraan besar. Untuk itu diperlukan pembangunan jalan menuju Licin dan pembangunan jembatan untuk mempermudah transportasi, distribusi ikan. Potensi yang ada antara lain Gotong-royong dan ketersediaan dana. Alternatif pemecahan masalah yaitu pembangunan jalan licin. Dan tindakan layak yang dapat dilakukan adalah pembangunan akses jalan menuju Licin.

Permasalahan yang ketiga adalah permasalahan perhatian pemerintah dan peneliti yang kurang. Hal ini disebabkan oleh akses jalan yang sulit. Alternatif pemecahan masalah adalah pembangunan jalan Licin dan komitmen dari pemerintah dan peneliti untuk meninjau Licin. Dan tindakan layak yang dapat dilakukan adalah pembangunan jalan Licin.

Permasalahan yang keempat adalah permasalahan proposal pembangunan yang diajukan oleh masyarakat melalui pemerintah desa tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Penyebabnya adalah pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah. Potensi yang ada adalah komitmen dari perangkat desa untuk melaksanakan pembangunan atau kegiatan tersebut. Alternatif pemecahan masalah adalah diskusi antara masyarakat dengan pemerintah tentang pentingnya kegiatan tersebut. Dan tindakan layak yang dapat dilakukan adalah diskusi antara masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

Selain itu permasalahan yang ada di Licin adalah kebijakan perikanan yang tidak menyentuh Licin. Penyebabnya adalah Licin bukan pelabuhan perikanan pantai atau pelabuhan besar sehingga kebijakan perikanan tidak menyentuh daerah. Potensi yang ada adalah kebijakan Bapeda dan DKP Kabupaten Malang. Alternatif pemecahan masalah adalah reorientasi kebijakan perikanan tidak hanya terfokus pada pantai-pantai yang memiliki status pelabuhan besar. Dan tindakan layak yang dapat dilakukan adalah reorientasi kebijakan perikanan tidak hanya terfokus pada pantai-pantai yang memiliki status pelabuhan besar.

Permasalahan selanjutnya adalah pemberian bantuan kapal yang diberikan oleh pemerintah dirasa kurang tepat oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan *top-down*, tidak memperhatikan kebutuhan dari masyarakat, karena masyarakat mengatakan bahwa tidak membutuhkan kapal karena telah memiliki kapal. Sehingga kapal bantuan tersebut pada akhirnya *mangkrak* atau tidak digunakan. Bisa jadi menurut pemerintah ini bisa menjadi penarik masyarakat Licin agar berprofesi menjadi nelayan. Alternatif pemecahan masalah adalah kebijakan yang *bottom up* dan sosialisasi atau penyuluhan pada masyarakat Licin mengenai potensi menjadi nelayan di Licin.

Tindakan layak yang dapat dilakukan adalah sosialisasi atau penyuluhan pada masyarakat Licin mengenai potensi menjadi nelayan Licin.

Permasalahan terakhir yang dikeluarkan masyarakat dalam FGD adalah kerugian yang dialami oleh nelayan. Kerugian ini disebabkan oleh pengojur yang ada di Pantai Licin. Potensi yang ada untuk mengatasi permasalahan ini adalah peran perempuan dan pokmaswas dalam mengawasi kegiatan perikanan. Tindakan layak yang dapat dilakukan adalah peran perempuan dalam melarang para pengojur.

IX. Daftar Peringkat Tindakan dapat dilihat pada tabel 12.

No	Tindakan yang layak	Dirasakan oleh banyak orang	Menghambat peningkatan pendapatan	Sering terjadi	Tersedia potensi untuk memecahkan masalah	Jumlah nilai	Urutan Peningkatan
1	Program Pemerintah untuk pembangunan Pelabuhan	7	7	7	7	28	1
2	Program Pembangunan Jalan Licin	7	7	6	6	26	2
3	Komitmen dari Pemerintah dan Peneliti	1	2	3	4	10	5
4	Diskusi antara masyarakat dan Pemerintah akan pentingnya kegiatan dalam proposal	1	3	4	1	9	6
5	Kebijakan DKP dan Bapeda	1	1	1	1	4	7

	Kabupaten Malang						
6	Kebijakan yang bersifat Bottom Up	5	6	5	1	17	4
7	Optimalisasi peran pokmaswas	7	7	5	5	24	3

Gambar 13. Peringkat Tindakan

Dari kegiatan FGD dan Kajian Jender yang dilakukan bahwa tindakan yang layak untuk mengatasi permasalahan di Dusun Licin Kabupaten Malang antara lain :

1. Diperlukan Program Pemerintah untuk membangun Pelabuhan Licin Kabupaten Malang
 1. Perlu dilaksanakan Program Pembangunan Jalan menuju Licin Kabupaten Malang untuk mempermudah akses pemasaran Ikan dari TPI Licin keluar Daerah
 2. Diperlukan optimalisasi peran POKMASWAS dalam mengawasi kegiatan perikanan termasuk dalam mengawasi pengojur
 3. Kebijakan yang bersifat bottom up. Artinya aspirasi dari masyarakat sendiri
 4. Komitmen dari peneliti serta pemerintah untuk meninjau Licin
 5. Perlu adanya diskusi antara masyarakat (Ketua Pokmaswas dengan pemerintah Kabupaten dalam mengegolkan atau melolostidakkan proposal kegiatan dari masyarakat
 6. Perlu adanya Kebijakan DKP dan Bappeda dalam melaksanakan otonomi daerah khususnya perikanan.

Dalam pelaksanaan FGD yang dilaksanakan oleh peneliti yang hadir adalah 7 orang dengan pembagian 6 laki-laki dan perempuan. Menurut Triono, Perempuan tidak dapat hadir dalam FGD karena alasan sedang sibuk di ladang dan laki-laki banyak yang hadir karena sedang istirahat. Ini memperlihatkan bahwa peran

perempuan dalam pembangunan adalah terhambat dengan kesibukan domestik dan pekerjaan diladang.

Pembangunan fisik berupa pelabuhan melalui pengembangan fisik yang ada akan menghabiskan dana sekitar Rp.2.000.000,00 dan pembangunan jalan membutuhkan dana sekitar Rp 200.000,00. Menurut salah satu anggota Pemkab Malang, ini tidak membutuhkan dana yang tidak terlalu besar sehingga pemerintah tidak akan terlalu keberatan. Tapi menimbang kondisi fasilitas yang berada di Pantai Licin yang kurang terawat. Memperlihatkan perhatian masyarakat maupun pengawasan dari pemerintah yang kurang. Menurut penulis pembangunan fisik memang diperlukan tapi tidak satu-satunya. Mencoba memperbaiki yang sudah ada, lalu diikuti dengan pembangunan menjadi pelabuhan.

Dalam Permen No. 16 tahun 2006, Pelabuhan selama ini Pelabuhan Perikanan diklasifikasikan kedalam 4 (empat) klas, yaitu:

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP);
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Dalam pasal selanjutnya juga membedakan klasifikasi tersebut pada fasilitas yang ada disana. Akan tetapi tidak ada perbedaan dalam pembangunan dan penerapan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Triono seorang warga mengatakan,

Di Licin tidak pernah ada pembangunan minapolitan dan sebagainya

Ini memperlihatkan bahwa adanya perbedaan perlakuan pada Pantai-pantai kecil di Kabupaten Malang. Sehingga perlu adanya perbaikan kebijakan pemerintah dan perhatian pemerintah terhadap pelabuhan-pelabuhan kecil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

✚ Pantai Licin adalah salah satu pantai yang berada di Kabupaten Malang. Pantai ini berada di Kabupaten Malang paling timur berbatasan dengan Lumajang. Dengan statusnya sebagai tempat sandar penangkapan ikan dengan fasilitas TPI (Tempat Pelelangan Ikan), Warung, Balai Pertemuan dan lain-lain.

✚ Profil Gender di Pantai Licin adalah sebagai berikut :

- Profil Aktivitas

Sektor Domestik didominasi oleh perempuan, sedangkan sektor publik oleh laki-laki. Perempuan membantu laki-laki. Sedangkan laki-laki tidak membantu perempuan. Sehingga hal ini terjadi *double burdent*.

- Profil Akses

Akses laki-laki lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

- Profil Kontrol

Kontrol terhadap sumberdaya laki-laki lebih mendominasi

- Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian kerja, akses, kontrol Pantai Licin Kabupaten Malang

- Tingkat Pendidikan : Jumlah Perempuan dan Laki-laki dalam pemerataan pendidikan belum mencapai pemerataan dan keadilan jender
- Budaya pada masyarakat sendiri
- Ekonomi

- Informasi

- ✚ Kebijakan pembangunan perikanan tahun 2000-2011. Mulai dari Revolusi Biru hingga Minapolitan. Tidak menyentuh Pantai Licin Kabupaten Malang.
- ✚ Program Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DKP belum terimplementasi. Dan di tahun 2011 program tersebutpun ada. Sehingga ini hanyalah perlu komitmen dalam pelaksanaannya saja.
- ✚ Kebijakan Perikanan termasuk Kebijakan yang bias jender sehingga perlu adanya pengkajian ulang terhadap kebijakan tersebut. Dan perlu dimonitoring pelaksanaannya.
- ✚ Dari Penelitian yang dilakukan bersama masyarakat Pantai Licin baik laki-laki dan perempuan dalam sebuah *Focus Group Discussion* bahwa tindakan yang layak untuk mengatasi permasalahan di Dusun Licin Kabupaten Malang antara lain :

Urutan Tindakan	Tindakan Yang Layak	Pelaksana
1	Program Pemerintah untuk pembangunan Pelabuhan	Pemerintah dan Masyarakat
2	Program Pembangunan Jalan Licin	Pemerintah dan Masyarakat
3	Komitmen dari Pemerintah dan Peneliti Untuk meninjau licin	Pemerintah dan Peneliti
4	Diskusi antara masyarakat dan Pemerintah akan pentingnya kegiatan dalam proposal untuk melostidaknya	Pemerintah dan masyarakat
5	Memperjelas Kebijakan Otonomi DKP dan Bapeda Kabupaten Malang	-
6	Kebijakan yang bersifat Bottom Up	-
7	Optimalisasi peran pokmaswas dalam mengawasi pengojur	Ketua Pokmaswas

Tabel 14. Tabel Saran yang dapat dilaksanakan

5.2. SARAN

Dari penelitian yang dilaksanakan saran yaitu Hendaknya pemerintah memperhatikan serta mengusahakan implementasi dari perencanaan program pembangunan wilayah perikanan yang telah disusun oleh penulis yang merupakan aspirasi dari masyarakat Licin Kabupaten Malang baik perempuan dan laki-laki. Karena ini adalah bentuk nyata dari pembangunan yang bersifat *bottom-up*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. 2006. Manajemen Pemberdayaan Perempuan. Alfabeta. Bandung
- BAPPEDA Jawa Tengah. Dukungan Masyarakat Jawa Tengah Terhadap Penanggulangan Kemiskinan. <http://p3b.bappenas.go.id/.../Bappeda.20Jateng.20Makalah.20MDG's.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2011.
- Black, James dan Champion, Dean. 1992. Metode dan Masalah Penelitian Sosial. Refika Aditama. Bandung
- Chalik, Abdul dan Yakin, Nurul. 2008. Ruang Sosial Perempuan Pesisir. Interpena. Yogyakarta
- Dahuri, Rokhmin. 1998. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan. PKSPL-IPB dan Puslitbang-Oseanologi-LIPI.
- Demartoto Argyo dan Budiatim Atik Catur. 2011. Analisis Kebutuhan Gender (Kajian Mengenai Pembekalan TKW yang akan dikirim ke Luar Negeri dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Responsif Gender di Kabupaten Karanganyar). <http://argyo.staff.uns.ac.id/files/2010/08/penelitian-kajian-wanita.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2011
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2005. Revitalisasi Perikanan. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Eryanto. 2007. Teknik Sampling : Analisis Opini Publik. LKIS. Yogyakarta
- Fitriawati, Rista dan Riniwati, Harsuko. 2010. Gender dan Pembangunan : Studi Kasus Pantai Mayangan Probolinggo. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Malang.
- Handayani, Christina dan Novianto, Ardhian. 2004. Kuasa Wanita Jawa. LKIS. Yogyakarta.

- Kusnadi. 2006. Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Humaniora. Yogyakarta.
- Kusnadi, DKK. 2006. Perempuan Pesisir. LKIS Pelangi Aksara. Yogyakarta.
- Oktamayanti, Dwi. 2006. Peranan Keuangan Masyarakat Pantai (LKMP). "Mina Sentosa" Dalam Pembiayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Upaya Pengembangan Masyarakat Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Malang.
- Mufidah. 2002. Gender dan Feminisme. LKIS Pelangi Aksara. Yogyakarta.
- Patilima, Hamid. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. CV Alfabeta. Bandung
- Priananta, Edwi Yoga. 2010. Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Penangkapan Pureseine yang menggunakan alat bantu rumpon di Pantai Prigi Kecamatan Watu Limo Kabupaten Trenggalek. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Malang
- Riniwati, Harsuko dkk. 2010. Gender dan Pembangunan Studi Kasus Pada Pembangunan Pelabuhan Pantai Mayangan Probolinggo. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Malang
- Riniwati, Harsuko dan Harahap, Nuddin. 2002. Diktat Mata Kuliah Gender. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Malang
- Riniwati, Harsuko dkk. 2004. Diktat Mata Kuliah Gender. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Malang
- Ritzer dan Goodman. 2004. Teori Sosiologi Modern. Prenada Media. Jakarta
- Smith, J. 2001. Dokumentasi. ymukhlis.staff.gunadarma.ac.id/downloads/files/.../dokumentasi.pdf
- Sudarta, Wayan. 2011. Peran Wanita dalam Pembangunan Berwawasan Gender. <http://www.infokedokteran.com/Peranan-Wanita-Dalam-Pembangunan-Berwawasan-Gender.html>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2011.
- Sunoto. 2011. Arah Kebijakan Pengembangan Konsep Minapolitan Di Indonesia. [Http://bulletin.Penataanruang.net/upload/data_artikel/edisi2%20pdf2c.pdf](http://bulletin.Penataanruang.net/upload/data_artikel/edisi2%20pdf2c.pdf) diakses pada tanggal 16 november 2011
- Wikipedia. 2011. Organisasi. <http://id.wikipedia.org/Organisasi>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2011.
- _____. Stereotip. <http://id.wikipedia.org/Stereotip>. Diakses pada tanggal 27 November 2011.
- _____. Double burden. [http://id.wikipedia.org/Double burden](http://id.wikipedia.org/Double_burden). Diakses pada tanggal 27 November 2011.

Winanti. 2010. Feminisme Psikoanalisis dan Gender.
<http://winanti5599.blog.esaunggul.ac.id/2010/08/27/feminisme-psikoanalisis-dan-gender/>.<http://adb.org/Documents/Translations/.../gender-study-main.id.pdf>.
Diakses pada tanggal 15 Agustus 2011.

Wulan, Ida Soesila. 2010. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2010-2014 Kebijakan dan Penelitian Lokakarya Dalam Rangka Pengukuhan Studi Wanita Sebagai Bidang Ilmu. Universitas Brawijaya. Malang.

Yusof Rohana. 2004. Penyelidikan Sains Sosial. PTS Publications and Distributors Sdn Bhd. Jakarta

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

